ENVIRONMENTAL GOVERNANCE PARTNERSHIP SYSTEM

PROYEK STUDI-AKSI SISTEM TATA-PEMERINTAHAN [illegible]

Project Working Paper Series No. 04

Perspektif Kelembagaan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citanduy

(Studi Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam)

Fredian Tonny

Desember, 2004

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

kemitraan

ISBN : 979- 8637-15-1

I.B.b.1, a.3, a.2.4 n = 10

Project Working Paper Series No. 04

Perspektif Kelembagaan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citanduy

(Studi Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam)

Fredion Tonny

Desember, 2004

Pusat Studi Pembangunan - Institut Pertanian Bogor

Bekerjasama dengan

Partnership for Governance Reform in Indonesia – UNDP

Perspektif Kelembagaan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citanduy

(Studi Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam)

PENULIS :

Fredian Tonny

Cetakan Pertama
Desember 2004

Diterbitkan oleh :

Pusat Studi Pembangunan - Institut Pertanian Bogor
Bekerjasama dengan
Partnership For Governance Reform in Indonesia - UNDP

Bogor, 2004

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Diperbolehkan mengutip dengan menyebutkan sumber

KATA PENGANTAR

Dari Perspektif Kelembagaan, terdapat hubungan kausal (sebab-akibat) antara fenomena perubahan "sumberdaya alam & lingkungan" dan "sistem-sosial" nya. Dalam kasus pengelolaan *common pool resources (CPR)* daerah aliran sungai (DAS) Citanduy, terdapat indikasi perubahan (penurunan) kuantitas dan kualitas sumberdaya alam yang diperkirakan berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial pada aras rumahtangga, kelompok dan organisasi sosial, kelembagaan, komunitas, dan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Sistem sosial yang sedang mengalami perubahan tersebut dipandang sebagi suatu "kelembagaan".

Salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) adalah dapat dicapainya pembangunan sosial-ekonomi dengan mempertahankan kepentingan sosial kemasyarakatan serta dengan tetap dapat dipertahankannya fungsi lingkungan hidup melaui suatu kelembagaan yang berkelanjutan *(institutional sustainability)*. Penataan kelembagaan pengelolaan DAS dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelakunya, sehingga dapat mengendalikan perubahan sumberdaya alam dan lingkungan fisik DAS yang cenderung semakin menurun kualitasnya.

Working paper ini, yang merupakan salah satu hasil sementara dari Kajian Sistem Kelembagaan dalam Studi Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam Daerah Aliran Sungai Citanduy, memfokuskan kepada telaah "apa faktor-faktor yang menentukan dan mempengaruhi keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal dan bagaimana tipologi kelembagaan komunitas lokal tersebut ?". Hasil telaah kelembagaan tersebut menjadi dasar bagi bagaimana strategi mengembangkan kelembagaan komunitas lokal di DAS Citanduy dalam kerangka kaji-tindak sistem kelembagaan tersebut.

Di sisi lain, kajian sistem kelembagaan ini dan relevansinya dengan aspek kajian yang lain, dapat digunakan sebagai "benang merah" untuk menjelaskan bagaimana strategi desentralisasi pengelolaan dan sistem tata-pemerintahan sumberdaya alam DAS Citanduy yang merujuk kepada prinsip-prinsip keberlanjutan *(sustainability)*, partisipasi *(participation)*, kemitraan *(partnership)*, dan desentralisasi *(decentralization)*. Akhimya, diharapkan dapat dirumuskan suatu sistem pengelolaan DAS Citanduy secara partisipatif, bersama masyarakat dan stakeholder lainnya.

Penulis,

Fredian Tonny

DAPTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		v
I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Perumusan Masalah	2
	1.3. Tujuan Studi	3
II.	KERANGKA KONSEPTUAL PENDEKATAN STUDI	4
III.	METODE STUDI	12
	3.1. Strategi Studi	12
	3.2. Pemilihan Lokasi dan Sampel	14
	3.3. Metode Pengumpulan Data	15
	3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data	15
IV.	KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS LOKAL	17
	4.1. Faktor-Faktor Penentu Keberlanjutan Kelembagaan	17
	4.2. Tingkat Keberlanjutan Kelembagaan	18
	4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Kelembagaan	19
	4.4. Ikhtisar	20
V.	ANALISIS TIPOLOGI DAN POLA HUBUNGAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS LOKAL	21
	5.1. Kerangka Konseptual Tipologi Kelembagaan	21
	5.2. Tipologi Kelembagaan	22
	5.3. Pola Hubungan Kelembagaan	24
	5.3. Ikhtisar	26
VI.	POLA DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS LOKAL	28
	6.1. Kehadiran Kelembagaan Komunitas Lokal	28
	6.2. Perubahan Fungsi dan Struktur	29
	6.3. Dinamika Kelembagaan	31
	6.4. Analisis *Social Capital* terhadap Dinamika Kelembagaan Komunitas Lokal	36
	6.5. Ikhtisar	38
VII.	KESIMPULAN	40
DAPTAR PUSTAKA		42

DAFTAR GAMBAR

Nomor	*Teks*	*Halaman*
1.	Pendekatan Konseptual Aspek Kelembagaan dan Pengembangan Kelembagaan Lokal dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam: *Common Pool Resources* Daerah Aliran Sungai Citanduy	9
2.	Keseimbangan Dinamis dan Hubungan Dialektis antara Community Based Development dan Regional Development dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam: Common Pool Resources Daerah Aliran Simgai Citanduy	10
3.	Kerangka Metodologis dan Rancangan Kajian Aspek Kelembagaan dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam Daerah Aliran Sungai Citanduy	13
4.	Tipologi Kelembagaan Komunitas Lokal	22
5.	Tipologi Kelembagaan Komunitas Lokal menurut Wilayah dan Tipologi di DAS Citanduy	23
6.	Tipologi Kelembagaan Komunitas Lokal menurut Tipe Kelembagaan dan Tipologi di DAS Citanduy	24

DAFTAR TABEL

Nomor	*Teks*	*Halaman*
1.	Perubahan Pengunaan Lahan *(Land-use)* di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy Tahun 1991-2001	3
2.	Jumlah Rumahtangga dan Desa Sampel menurut Wilayah Geo-Ekologis dan Sosial Ekonomi menurut Wilayah di DAS Citanduy	15
3.	Coefisien Variance Lima Variabel Penentu Keberlanjutan Kelembagaan Komunitas Lokal di DAS Citanduy	18
4.	Skor Keberlanjutan Kelembagaan menurut Wilayah dan Tipe Kelembagaan di DAS Citanduy	19
5.	Koefisien Korelasi antara Variabel-Variabel Independen dan Variabel-Variabel Dependen	20
6.	Jumlah dan Persentase Responden yang Menilai Kelembagaan menurut Wilayah dan Tipologi di DAS Citanduy	23
7.	Jumlah dan Persentase Responden yang Menilai Kelembagaan menurut Tipe Kelembagaan dan Tipologi di DAS Citanduy	24
8.	Matriks Studi Kasus terhadap Kelembagaan Produksi di Tiga Wilayah DAS Citanduy	33
9.	Matriks Studi Kasus terhadap Kelembagaan Konservasi di Wilayah DAS Citanduy	34
10.	Matriks Studi Kasus terhadap Kelembagaan Koperasi di Wilayah DAS Citanduy	35
11.	Matriks Pola Perkembangan Tiga Jenis Kelembagaan di DAS Citanduy	37

BAB I

PENDAHULUAN

Kriteria umum yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) adalah dapat dicapainya pembangunan sosial-ekonomi dengan mempertahankan kepentingan sosial kemasyarakatan serta dengan tetap dapat dipertahankannya fungsi lingkungan hidup. Penataan kelembagaan pengelolaan DAS dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelakunya, sehingga dapat mengendalikan perubahan sumberdaya alam dan lingkungan fisik DAS yang cenderung semakin menurun kualitasnya.

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan DAS Citanduy adalah pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang ada di dalam DAS tersebut secara rasional dengan tujuan mencapai keuntungan maksimum dalam waktu yang tidak terbatas dengan risiko kerusakan sumberdaya dan lingkungan seminimal mungkin. Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan DAS Citanduy dapat dipandang sebagai suatu sistem sumberdaya, satuan pengembangan sosial ekonomi dan satuan pengaturan tata ruang wilayah. Pengelolaan DAS Citanduy dijalankan berdasarkan prinsip konservasi sumberdaya *(resources sustainability)* yang mengandung makna keterpaduan antara prinsip produktifitas dan konservasi sumberdaya *(sustainability = productivity + conservation of resources)* dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan DAS.

Tujuan-tujuan pengelolaan DAS tersebut meliputi: (1) terjaminnya penggunaan sumberdaya alam yang lestari; (2) tercapainya keseimbangan ekologis lingkungan sebagai sistem penyangga kehidupan; (3) terjaminnya kuantitas dan kualitas air sepanjang tahun; (4) mengendalikan aliran permukaan dan banjir; dan (5) mengendalikan erosi tanah dan proses degradasi lahan lainnya. Prinsip keberlanjutan *(sustainability)* menjadi acuan dalam mengelola DAS, yakni fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial-budaya dari berbagai sumberdaya dalam DAS Citanduy dapat terjamin secara berimbang.

Berdasarkan telaah terhadap DAS Citanduy, khususnya tinjauan mengenai karakteristik sumberdaya alamnya, dapat diidentifikasi bahwa kerusakan sumberdaya alam di DAS Citanduy disebabkan antara lain: (1) Berbagai kegiatan pembangunan yang lebih menitik-beratkan pada produksi komoditi; (2) Lemahnya kelembagaan, dalam arti aturan main maupun organisasi) yang tujuannya mencegah rusaknya sumberdaya; dan (3) Lemahnya kelembagaan yang tugasnya melaksanakan penyelesaian konflik dan penataan penguasaan, pemilikan serta pemanfaatan sumber-sumber agraria.

Bersumber dari lemahnya kerjasama antar sektor dan/atau antar daerah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun antar provinsi, muncul sejumlah masalah dalam pengelolaan sumberdaya alam di DAS Citanduy. Dampak dari permasalahan tersebut dirasakan pula sampai di tingkat komunitas dan gejala demikian hampir terjadi di semua wilayah DAS Citanduy.

Permasalahan yang menyangkut lemahnya kelembagaan dan kerjasama antar-sektor dan antar-daerah, yang menyebabkan tidak terkendalinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan di DAS Citanduy, tidak akan dapat diatasi akar masalalnya apabila tidak diupayakan suatu "pendekatan" baru dari Perspektif Kelembagaan.

Perkembangan pembangunan di wilayah DAS Citanduy yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja akan senantiasa mengeksploitasi sumberdaya alam sebagai faktor produksi yang diperlukan. Orientasi ekonomi pada sumberdaya alam tersebut, dalam kondisi lemahnya kelembagaan publik yang mengatumya, akan mengabaikan fungsi sumberdaya alam sebagai daya dukung kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan yang dapat mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan dalam waktu yang sama mampu mempertahakan fungsi sumberdaya alam yang memproduksi barang dan jasa.

Aktifitas pembangunan sektoral di DAS Citanduy sampai sejauh ini akan senantiasa bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam. Sementara itu, pelestarian sumberdaya alam tersebut sangat bergantung kepada daya dukungnya. Oleh karena itu, bentuk pengorganisasian pemanfaatan sumberdaya alam di DAS Citanduy perlu memperhatikan pelestarian sumberdaya alam tersebut

Dengan demikian, pertanyaan pokok kajian studi ini adalah "bagaimana strategi mengembangkan hubungan kelembagaan dan kelembagaan lokal pengelolaan *CPR* dalam rangka desentralisasi pengelolaan dan sistem tata pamong sumberdaya alam di DAS Citanduy ?"

1.2. Perumusan Masalah

DAS Citanduy merupakan salah satu "DAS Prioritas" di Indonesia. Artinya, DAS ini sedang mengalami penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam serta degradasi atau kerusakan lingkungan. Permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan tersebut dipandang sebagai permasalahan yang bersifat multi-dimensional. Oleh karena itu, menurut pandangan pemerintah (pusat), DAS Citanduy perlu mendapatkan perhatian yang serius dengan meiaksanakan program-program prioritas dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya.

Salah satu faktor penyebab penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan di DAS Citanduy adalah sistem pengelolaan DAS yang sangat sentralistis, dimana sejak tahap perencanaan, inisiasi kegiatan hingga implementasi dan evaluasi program seluruhnya dilakukan secara *top*-down. Pada masa itu, pada masa Pemerintahan Orde Baru (sebelum 1998), pemerintah memiliki posisi sangat menentukan dalam mengarahkan jalannya suatu program atau kegiatan di DAS Citanduy tanpa memperdulikan aspirasi lokal yang berkembang.

Sentrahsasi pengelolaan sumberdaya alam pada masa itu, termasuk di DAS Citanduy, menjadi ciri utama proses pengelolaan sumberdaya alam bersama *(common pool resources – CPR)*. Pengelolaan DAS sebagai *CPR* sangat bias pada pendekatan wilayah dan sulit ditemukan pembenaran bahwa pengelolaan DAS telah mengakomodasikan kepentingan-kepentingan dalam suatu *cluster ekosistem lintas wilayah* (Proposal PSP IPB, 2004).

Meskipun demikian, ketika diimplementasikamya desentralisasi dan otonomi daerah (merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dimana komunitas lokal mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam proses-proses perumusan dan pengambilan keputusan di DAS Citanduy, apabila tidak dikontrol dengan baik akan dapat menimbulkan kegagaglan pengelolaan *CPR* yang sama buruknya sebagaimana yang terjadi dalam pengelolaan yang sentralistis. Pendekatan yang terkotak-kotak dan cenderung mempertahankan "egoisme-regional" akan menekan efektivitas pengelolaan *CPR* pada tingkat terendah. Oleh karena setiap pemerintah kabupaten yang bagian dari wilayahnya termasuk ke dalam DAS Citanduy akan cenderung mengembangkan kawasan mereka menurut sclera masing-masing. Padahal, DAS Citanduy sebagai suatu kesatuan dan jejaring ekosistem, sangat rentan pada pendekatan parsial karena proses-proses pertukaran energi, materi dan informasi dalam suatu ekosistem sesungguhnya tidak "mengenai" batas wilayah administratif.

Dari Perspektif Kelembagaan, terdapat hubungan kausal (sebab-akibat) antara fenomena "sumberdaya alam & lingkungan" dan "sistem sosial" nya. Secara teoritis dan empiris, konsep "kelembagaan" dapat menjelaskan hubungan antara perubahan-perubahan sumberdaya alam & lingkungan dan sistem sosialnya. Dalam kasus pengelolaan *CPR* di DAS Citanduy, indikasi penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam (Tabel 1) diperkirakan erat kaitannya dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada tingkat rumahtangga, kelompok dan organisasi sosial, komunitas, dan masayarakat (sistem sosial). Secara sosiologis tingkatan sistem sosial tersebut dan pola hubungan antar-kelompok dan organisasi sosial tersebut dipandang sebagai suatu "kelembagaan".

Tabel 1. Perubahan Pengunaan Lahan (*Land-use*) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy Tahun 1991-2001

Land-use	1991 (Ha)	2001 (Ha)	*Change*
Hutan alam	28823.22	28078.92	-744.30
Hutan tanaman	109837.71	65401.65	-44436.06
Hutan mangrove	7769.43	10689.93	2920.50
Kebun campuran	90936.18	140222.25	49286.07
Belukar	20072.97	20366.01	293.04
Rumput/alang	17908.56	5514.30	-12394.26
Barelands	22419.45	3149.01	-19270.44
Upland	36389.16	48580.92	12191.76
Sawah	54578.70	57815.37	3236.67
Air	35343.81	35794.53	450.72
Terbangun	15809.58	24307.74	8498.16
No data	34526.79	34526.79	0.00
Tanah timbul	560.79	110.52	-450.27
Tambak	0.00	418.41	418.41

Sumber: Lilik Budi Prasetyo (2004)

Perubahan penggunaan lahan di DAS Citanduy tersebut mengindikasikan telah terjadi proses penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan degradasi lingkungan. Secara sosiologis indikasi tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan-perubahan sosial di DAS tersebut, khususnya perubahan kelembagaan yang cenderung mengindikasikan bahwa kelembagaan-kelembagaan dan hubungan kelembagaan di DAS Citanduy tidak berkelanjutan *(institutional unsustainability)*.

1.3. Tujuan Studi

Dalam keseluruhan Studi Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam *(Decentralized Natural Resources Management and Governance System)* Daerah Aliran Sungai Citanduy, studi kelembagaan ini bertujuan menemukan cara atau "model" solusi konflik sumberdaya *(natural resources conflict)* dan konflik sosial ekonomi, serta pola pengaturan institusional (kemitraan) yang secara efektif mampu menekan prevalensi ketegangan atau konflik sosial horisontal (antar-komunitas dan antar-regional) ataupun konflik vertikal atas pengelolaan sumberdaya alam bersama (CPR) DAS Citanduy. Selanjutnya studi ini akan merancang dan mengimplementasikan sistem ketatalaksanaan lingkungan yang berorientasi pada prinsip kemitraan *(environmental governance partnership system – EGPS)* pada komunitas lokal dan regional, sehingga cita-cita keberlanjutan sistem sosial-ekonomi-ekologi dapat tercapai.

Secara spesifik, dalam aspek kelembagaan dan pengembangan kelembagaan lokal, beberapa topik penting yang menjadi fokus kajian ini meliputi: (1) Peta *existing indigenous institutions for good environmental governance* CPR baik di tingkat komunitas setempat maupun kota/kabupaten/regional; (2) Aspek modal sosial pada EGPS termasuk kemungkinan dekapitalisasi modal sosial ke depan; (3) Bentuk-bentuk *communal and community networking;* (4) Strategi penumbuhan, pengembangan dan keberlanjutan kelembagaan – CPR *institutional sustainability;* (5) Dinamika kelembagaan, ramifikasi, dan kemungkinan perubahan kelembagaan – *institutional change;* dan (6) Kemungkinan terjadinya *institution malfunction* CPR dimasa depan.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENDEKATAN STUDI

Umumnya, kelembagaan sering diartikan sebagai organisasi, yang dalam banyak hal dapat merancukan pengertian yang sebenarnya dari kelembagaan tersebut, seperti yang dipaparkan oleh Schmid (1987) :

> "Kelembagaan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, yang telah mendefinisikan kesempatan-kesempatan yang tersedia, mendefinisikan bentuk-bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak-hak istimewa yang telah diberikan serta tanggung-jawab yang harus mereka lakukan. Hak-hak tersebut mengatur hubungan antar individu dan/atau kelompok yang terlibat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam tertentu".

Kelembagaan mengarahkan perilaku individu dan masyarakat agar sejalan dengan tujuan umum (publik) yang ditetapkan. Misalnya, dalam konteks DAS Citanduy bagaimana agar petani di wilayah hulu dapat lebih melakukan konservasi lahan pertaniannya, bukan semata-mata umtuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dirinya sendiri melainkan juga tmtuk menjaga kesuburan lahan secara luas. Begitu juga misalnya, bagaimana agar perusahaan yang bekerja di kawasan hutan negara tidak melakukan penebangan kayu melebihi daya dukung hutan yang dikelolanya.

Fokus kajian ini adalah pada kelembagaan dan pengembangan kelembagaan lokal. Dari Perspektif Sosiologi, "kelembagaan" dapat dipahami sebagai "tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi, dan sistem sosial lainnya" (Bertrand, 1974). Perspektif ini memandang "kelembagaan" sebagai kompleks peraturan dan peranan sosial secara abstrak, dan memandang asosiasi sebagai bentuk-bentuk organisasi yang kongkrit. Sedangkan "pengembangan kelembagaan" dapat diartikan sebagai suatu proses pelembagaan, yakni suatu proses strukturalisasi antar-hubungan melalui enkulturasi norma-norma dan nilai-nilai baru mengenai kebutuhan pokok manusia. Dalam hal ini, kebutuhan pokok manusia tersebut dibatasi pada kebutuhan *common pool resources* di DAS Citanduy. Dengan kata lain, kelembagaan dalam masyarakat berkembang melalui suatu proses pelembagaan. Pandangan ini relevan dengan evolusi kelembagaan yang terjadi karena perubahan nilai, yang mendorong para pelaku untuk menjadi lebih baik dengan memilih alternatif atau memodifikasi kelembagaan yang ada (Bardhan, 1989).

Dalam hal yang lebih khas -- yakni kelembagaan dan kelembagaan lokal, yang menunjukkan pola hubungan antar-manusia dan antar-oragnisasi sosial dengan sumberdaya di DAS Citanduy -- "kelembagaan" dapat dipahami sebagai "sistem pengorganisasi dan kontrol terhadap sumberdaya yang merupakan gugus kesempatan bagi pelaku yang mendukung kelembagaan tersebut dalam membuat keputusan dan meiaksanakan aktifitasnya" (Schmid, 1987). Kelembagaan seperti ini dicirikan oleh: (1) batas yurisdiksi; (2) *property rights*; dan (3) aturan representasi (*rules of representation*). Batas yurisdiksi diartikan sebagai wilayah kekuasaan atau batas wewenang (otoritas) yang dimiliki suatu kelembagaan. Perubahan batas yurisdiksi ditentukan oleh perasaan se-komunitas *(sense of community)*, eksternalitas, homogenitas, dan skala ekonomi.

Ciri *property rights* dipahami sebagai suatu hukum, adat dan tradisi, atau konsensus yang mengatur hubungan antar-orang dan antar-organisasi sosial terhadap sumberdaya.

Sedangkan aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartislpasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian perubahan kelembagaan atau evolusi kelembagaan dicirikan oleh perubahan satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut.

Berdasarkan telaah di atas, maka dapat dipahami bahwa wujud kongkrit dari "aspek kelembagaan dan pengembangan kelembagaan lokal" adalah kelompok-kelompok dan organisasi sosial dan pola hubungan antar-kelompok atau antar-organisasi dalam pengelolaan sumberdaya (sumber-sumber agraria) di DAS Citanduy. Sedangkan pengembangan kelembagaan atau proses pelembagaan dapat diartikan sebagai upaya mendapatkan inovasi baru pada sumberdaya di DAS tersebut melalui perubahan norma dan nilai, pola-pola perilaku dalam hubungan antar-orang (kelompok dan organisasi sosial) dan antar-kelompok sosial (bandingkan dengan pemahaman Esman, 1962).

Oleh karena itu, dalam Perspektif Kelembagaan DAS Citanduy dapat dipahami dalam tiga hal. Pertama, DAS Citanduy sebagai sebagai suatu bentang alam maka ia merupakan sumberdaya *stock*. Dalam hal ini, meskipun sumberdaya *stock* menghasilkan komoditi, namun perhatian bagi pengelola DAS tidaklah hanya kepada komoditi, tetapi justru kepada sumberdaya *stock* yang menghasilkan jasa. Kedua, di dalam bentang alam DAS Citanduy terdapat berbagai bentuk pemilikan, yaitu hak individu, hak komunitas, hak negara serta berbagai turunannya seperti hak sewa, hak guna usaha, dan lain-lain. Oleh karena perhatian pengelola DAS, dan sifat-sifat jasa tidak melekat pada sumber prcduksinya, maka sifat pemilikannya tidak pernah cukup apabila hanya diklaim sebagai pemilikan individu. Ketiga, sehubungan dengan sifat pemilikan tersebut, adanya sifat ongkos eksklusi dan transaksi tinggi juga menhendaki pengaturan yang tidak dapat dilakukan hanya melalui mekanisme pasar, melainkan dengan menetapkan kelembagaan atau aturan main yang sesuai. Hal ini diperkuat oleh karakteristik yang melekat dalam DAS Citanduy, yaitu bahwa ia mewujudkan suatu bentuk interdependensi antar individu dan/atau kelompok masyarakat.

Dengan demikian, dapat dirumuskan pemahaman DAS Citanduy dari Perspektif Kelembagaan, yakni :

> "Sebagai sumberdaya alam yang berupa *stock* dengan ragam pemilikan *(private, common, state property)*, dan berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa, baik bagi individu dan/atau kelompok masyarakat maupun bagi publik secara luas serta menyebabkan interdependensi antar-pihak, individu dan/atau kelompok masyarakat".

Pengembangan kelembagaan adalah proses dimana anggota-anggota masyarakat meningkatkan kapasitas kelembagaannya untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, kelembagaan dan kelembagaan lokal di DAS Citanduy dapat dilacak berdasarkan aspek historis atau riwayat (proses atau dinamikanya) dan keberlanjutan kelembagaan tersebut *(institutional sustainability)*. Secara konseptual, sejarah atau riwayat perkembangan kelembagaan tersebut erat kaitannya dengan keberlanjutan kelembagaan tersebut.

Berdasarkan aspek historis atau riwayatnya dapat diidentifikasi beragam kelembagaan di DAS Citanduy. Demikian pula perkembangan beragam kelembagaan tersebut menunjukkan tipe dan dinamika yang berbeda antara satu kelembagaan dengan

kelembagaan lain karena pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal. Pada taraf ini, dinamika kelembagaan tersebut dipahami sebagai "pola hubungan dalam kelembagaan dan antar-kelembagaan" dalam sistem "pengelolaan" DAS Citanduy. Oleh karena itu, secara konseptual dinamika kelembagaan tersebut selain diidentifikasi menurut sistem DAS, diperlukan suatu konsep yang komprehensif dan holistik untuk memahami kekhasan dinamika dan tipologi masing-masing kelembagaan di DAS tersebut. Menurut Dasgupta (2000) dan Fukuyama (2001), dinamika kelembagaan tersebut dapat dijelaskan dengan "hubungan fungsional" antara konsep modal sosial *(social capital)*, modal manusia *(human capital)*, dan modal fisik *(physical capital)*. Modal fisik dapat berupa prasarana dan sarana fisik akan tetapi perlu dibedakan dari segi *property rights*. Kelompok atau organisasi dapat memperhitungkan modal fisik dalam wujudnya yang berbeda untuk memasukkannya dalam proses produksi. Modal manusia merupakan kemampuan teknis, keterampilan yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan dan dirancang umtuk memproduksi sesuatu. Sedangkan modal sosial menekankan pada "hubungan timbal balik" dan menunjuk pada hubungan sosial, institusi, dan struktur sosial dengan jejaring *(networking)* sebagai *"added value"* nya.

Secara hipotetis, hubungan fungsional tersebut dapat dipahami sebagai berikut: (1) modal sosial dalam bentuk potensial akan diaktualisasikan apabila ada rasa percaya *(trust)* pada potensi yang dimiliki orang atau kelompok sosial lain berupa modal manusia; (2) modal manusia dapat berkembang karena modal sosial; dan (3) modal fisik dapat berkembang, bertahan, dan berfungsi dengan baik apabila didukung oleh modal manusia dan modal sosial. Dengan demikian, kelembagaan dan kelembagaan lokal sebagai suatu sistem pengorganisasian dan kontrol terhadap sumberdaya di DAS Citanduy serta dinamikanya, relevan dipahami dengan "Formula Hubungan Fungsional antara Modal Fisik - Modal Manusia - Modal Sosial" yang dibatasi pada sifat lokalitas, seperti dalam suatu komunitas.

Resultan dari dinamika perkembangan kelembagaan dn kelembagaan lokal di DAS Citanduy adalah keberhasilan (berhasil atau tidak berhasil) kelembagaan tersebut. Keberhasilan kelembagaan tersebut ditunjukkan sampai sejauh mana kelembagaan tersebut mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi. Secara empiris, kemampuan beradaptasi tersebut dapat ditelaah dari aspek historis dan riwayat masing-masing kelembagaan dan kelembagaan lokal di DAS tersebut. Tingkat kemampuan beradaptasi kelembagaan tersebut terhadap perubahan sosial yang terjadi ditunjukkan dengan sampai sejauh mana tingkat keberlanjutan kelembagaan *(institutional sustainability)*. Ukuran tingkat keberlanjutan kelembagaan tersebut dapat dinilai berdasarkan variabel-variabel partisipasi, *good governance*, keragaan, kompleksitas, dan derajat kemerosotan *(deterioration)* kelembagaan tersebut (Brinkerhoff & Goldsmith, 1992).

Secara hipotetis, tingkat keberlanjutan kelembagaan DAS akan ditentukan oleh faktor-faktor internal dan eksternal (komunitasnya) sebagai *determinant faktors*. Faktor-faktor internal antara lain kepemimpinan dan tingkat pendidikan. Sedangkan faktor-faktor eksternal antara lain kebijakan pemerintah lokal dan insentif kelembagaan *(institutional incentive)*. Meskipun faktor-faktor determinan tersebut dikategorikan sebagai faktor internal dan eksternal, perlu diidentifikasi pula variabel pokok yang "rnenghubungkan" antara aspek internal dan eksternal, yaitu jejaring *(networking)* yang diduga akan

menentukan tingkan keberlanjutan kelembagaan dan kelembagaan lokal di DAS Citanduy (Gambar 1).

Dalam merancang dan mengimplementasikan sistem ketatalaksanaan lingkungan yang berorientasi pada prinsip kemitraan *(environmental governance partnership system - EGPS)* pada komumitas lokal dan regional di DAS Citanduy, diperlukan suatu pendekatan yang holistik dan partisipatif *(holistic and participatory approach)* sehingga cita-cita keberlanjutan sistem sosial-ekonomi-ekologi dapat tercapai.

Oleh karena itu, konsistensi antara perencanaan dan implementasi sistem ketatalaksanaan lingkungan yang berorientasi pada prinsip kemitraaan yang dirumuskan dari "bawah" dan bersifat partisipatif, secara selektif perlu pula dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif. Akan tetapi, tanpa kebijakan makro yang mampu "memahami" program-program partisipatif dan secara institusional mampu memberikan "insentif " *(institutional incentives)* dalam implementasi tersebut, sulit diharapkan program-program tersebut dapat "*sustain*" dan "*survive*". Dengan demikian, secara komprehensif, proses perancangan dan implementasi tersebut perlu didekati dengan "memadukan" pendekatan "*bottom-up*" (beragam program mikro) dan "*top-down*" (kebijakan makro).

Permasalahannya, dengan perspektif kelembagaan dan kelembagaan lokal, sampai sejauh mana suatu "keseimbangan dinamis" yang "dialektis" dapat diciptakan antara pendekatan "*bottom-up*" dan pendekatan "*top-down*" dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam: *Common Pool Resources* Daerah Aliran Sungai memantapkan peran pemerintah dengan "*top-down*" nya dan sangat dominan. Berdasarkan pengalaman selama 32 tahun kekuasaan rezim Orde Baru, tampak bahwa dalam suatu implementasi strategi pembangunan, dengan kekuasaan yang sentralistis cenderung melemahkan masyarakat "lapisan bawah".

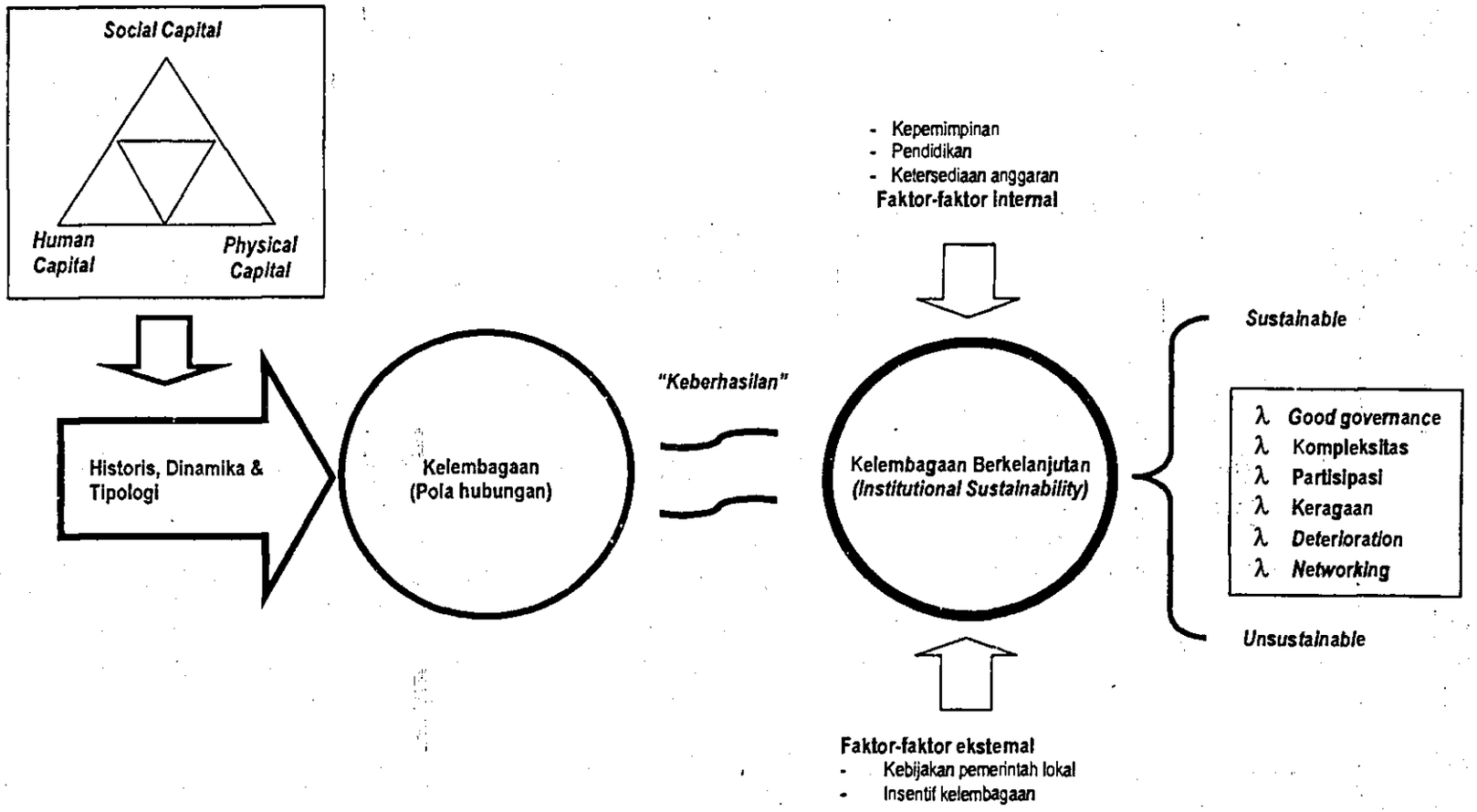

Gambar 1.

Pendekatan Konseptual Aspek Kelembagaan dan Pengembangan Kelembagaan Lokal dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam: *Common Pool Resources* Daerah Aliran Sungai Citanduy

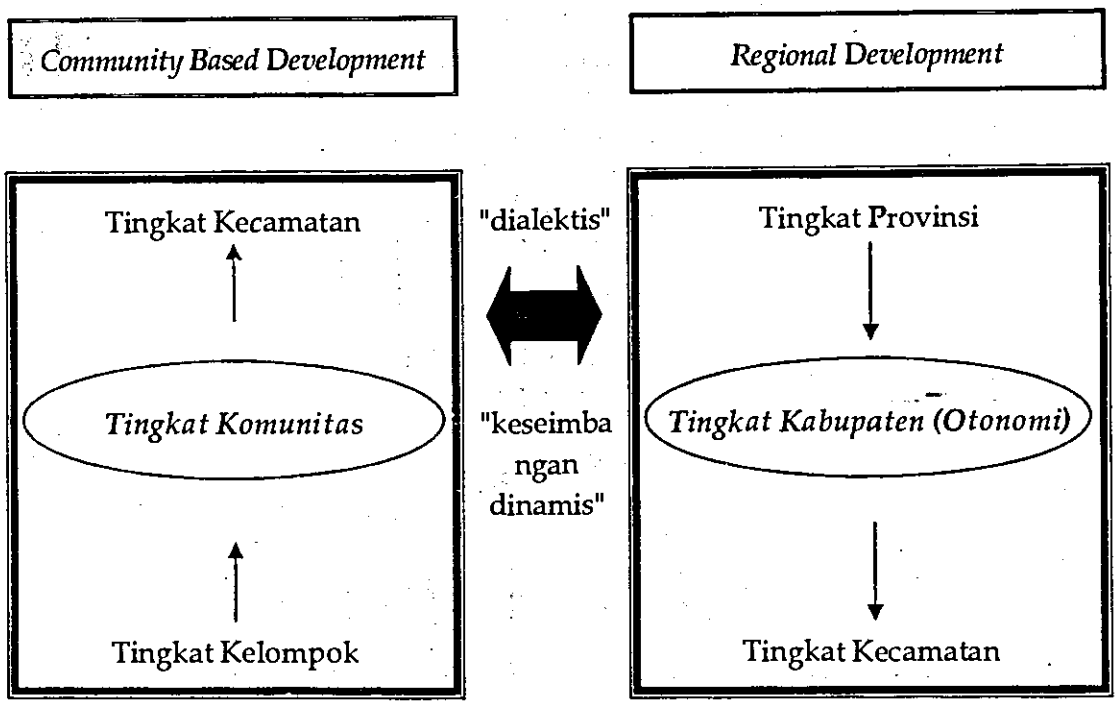

Gambar 2.

Keseimbangan Dinamis dan Hubungan Dialektis antara *Community Based Development* dan *Regional Development* dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam: *Common Pool Resources* Daerah Aliran Sungai Citanduy

Ketidakberdayaan menghadapi peran dominan pemerintah tersebut, karena memang masyarakat lapisan tidak pernah diberi kesempatan untuk berdaya dalam "menghadapi" peran tersebut. Bahkan dengan berlandaskan kepada kepentingan publik pun, kelembagaan-kelembagaan perwakilan tidak mampu "membatasi" peran dominan pemerintah ketika itu. Oleh karena itu, dalam kajian ini, strategi pengembangan kelembagaan dan kelembagaan lokal perlu didekati dengan upaya-upaya "*community based development*" (yang bersifat "*top-down*") dan pengembangan proses-proses kebijakan pada tingkat "*regional development*" yang mampu mendukung dan memfasilitasi *community based development* tersebut (Gambar 2).

Dalam *community based development* difokuskan kepada upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat komunitas melalui pengembangan program-program partisipatif di tingkat kelompok dengan menciptakan integrasi territorial dan ekonomi. Kemudian, program-program partisipatif tersebut di tingkatkan skalanya sampai ke tingkat komunitas dan desa dengan menciptakan beragam jaringan sosial (*social networking*). Melalui pengembangan program-program partisipatif tersebut diperkirakan akan mampu memberdayakan beragam kelembagaan dan komunitas di DAS Citanduy dengan indikasi munculnya suatu"*community and institutional sustainability*".

Munculnya beragam komunitas dan kelembagaan yang *sustainable* di DAS tersebut tidak hanya semata-mata disebabkan oleh kekuatan "faktor internal", tetapi lebih dari itu

mampu mendukung dan memfasilitasi kekuatan dari "bawah" tersebut. Kekuatan-kekuatan faktor eksternal yang diperlukan dalam hal ini adalah beragam kebijakan *local government*, yang berpusat kepada tingkat kabupaten (sebagai daerah otonomi dalam rangka desentralisasi), yang mampu mendukung dan memfasilitasi beragam aktivitas partisipatif agar berkembang dan berkelanjutan.

Dengan berlandaskan kepada pendekatan tersebut di atas, dalam perumusan bentuk kelembagaan dan kelembagaan lokal di DAS Citanduy, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Pertama, kelembagaan tersebut merupakan manifestasi dari "*sharing*" seluruh *stakeholder*, dimana peranan dari masing-masing *stakeholder* dalam kelembagaan tersebut (pola hubungan) dapat ditelaah secara kritis dari analisis pihak-pihak terkait.. Telaah ini penting terutama untuk menetapkan dimana kedudukan organisasi atau badan yang meiaksanakan fungsi hubungan kelembagaan tersebut. Kedua, fokus "pekerjaan" kelembagaan tersebut adalah kepada aktivitas yang partisipatif dan diperkirakan secara operasional dapat didukung dan difasiliatsi oleh beragam kebijakan *local government*. Oleh karena itu, untuk memperkirakan hal tersebut perlu dirumuskan suatu matriks antara "program-program partisipatif" dengan "persyaratan kebijakan makro dan regional" yang dapat mengidentifikasi "beragam kebijakan apa saja yang perlu dirumuskan oleh *local government*." Terakhir, kelembagaan tersebut baik secara konseptual maupun operasional mampu mengimplementasikan kaidah-kaidah desentralisasi dan otonomi daerah yang telah ditetapkan pada satuan daerah tingkat dua atau kabupaten/kota (UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999). Prinsip ini penting, terutama untuk mendukung aksi-aksi kolektif partisipatif dan sampai sejauh mana kabupaten/kota dan/atau *local government* mampu membiayai beragam implementasi dari aktivitas partisipatif tersebut.

BAB III
METODE STUDI

Aktifitas riset pada Tahap-1 ini difokuskan kepada "pemetaan" *existing indigenous institutions for good environmental governance* CPR baik di tingkat komunitas setempat maupun kabupaten/Kota/DAS (Lihat Gambar 3). Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data difokuskan kepada keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal, faktor-faktor yang menentukan dan mempengaruhinya, tipologi kelembagaan, dan keterkaitan antara kelembagaan di komunitas lokal dan kelembagaan di tingkat supra lokal. Hasil analisis ini diharapkan dapat memetakan kelembagaan di DAS Citanduy yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk meiaksanakan aksi pengembangan kelembagaan di DAS Citanduy.

3.1. Strategi Studi

Kajian aspek kelembagaan dan pengembangan kelembagaan lokal dilakukan di Daerah Aliran Sungai Citanduy. Pendekatan kajian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, meskipun demikian lebih menekankan pada pendekatan kualitatif. Strategi kajian yang digunakan adalah Metode Studi Kasus dan Metode Kaji-Tindak.

Merujuk kepada tujuan kajian, dalam perspektif kelembagaan, "keterkaitan" antara tujuan-tujuan khusus (aspek kelembagaan) dengan tujuan umum kajian ini menggambarkan suatu kebutuhan yang terintegrasi antara kajian dan tindakan *(action)*. Disamping itu pendekatan dan strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan kajian ini adalah secara bertahap atau periodik, yang menggunakan beberapa metode riset sebagai dasar untuk melakukan aksi, dan secara gradual metode riset tersebut digunakan pula sebagai alat evaluasi terhadap aksi yang sedang dilakukan untuk sampai kepada penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, desain dan rancangan riset yang sesuai dengan tujuan riset ini dan dapat "mengintegrasikan" metode-metode yang lain adalah *Action Research* atau Kaji -Tindak.

Oleh karena itu kajian ini bersifat "luas dan mendalam". Kemudian dari metode-metode riset yang digunakan, dapat diidentifikasi bahwa "luas" nya metode kuantitatif dan "dalam" nya metode-metode kualitatif yang digunakan menuntut riset yang memerlukan waktu relatif lama. Oleh karena itu, menurut lamanya, riset ini dapat dikategorikan sebagai *longitudinal study* atau penelitian jangka panjang.

Pada dasarnya hasil akhir yang diharapkan dari riset ini adalah menemukan alternatif cara atau "model" solusi konflik sumberdaya *(natural resources conflict)* dan konflik sosial ekonomi, serta pola pengaturan institusional (kemitraan) di tingkat komunitas dan lokalitas yang secara efektif mampu menekan prevalensi ketegangan atau konflik sosial horisontal (antar-komunitas dan antar-regional) ataupun konflik vertikal atas pengelolaan sumberdaya alam bersama (CPR) DAS Citanduy.

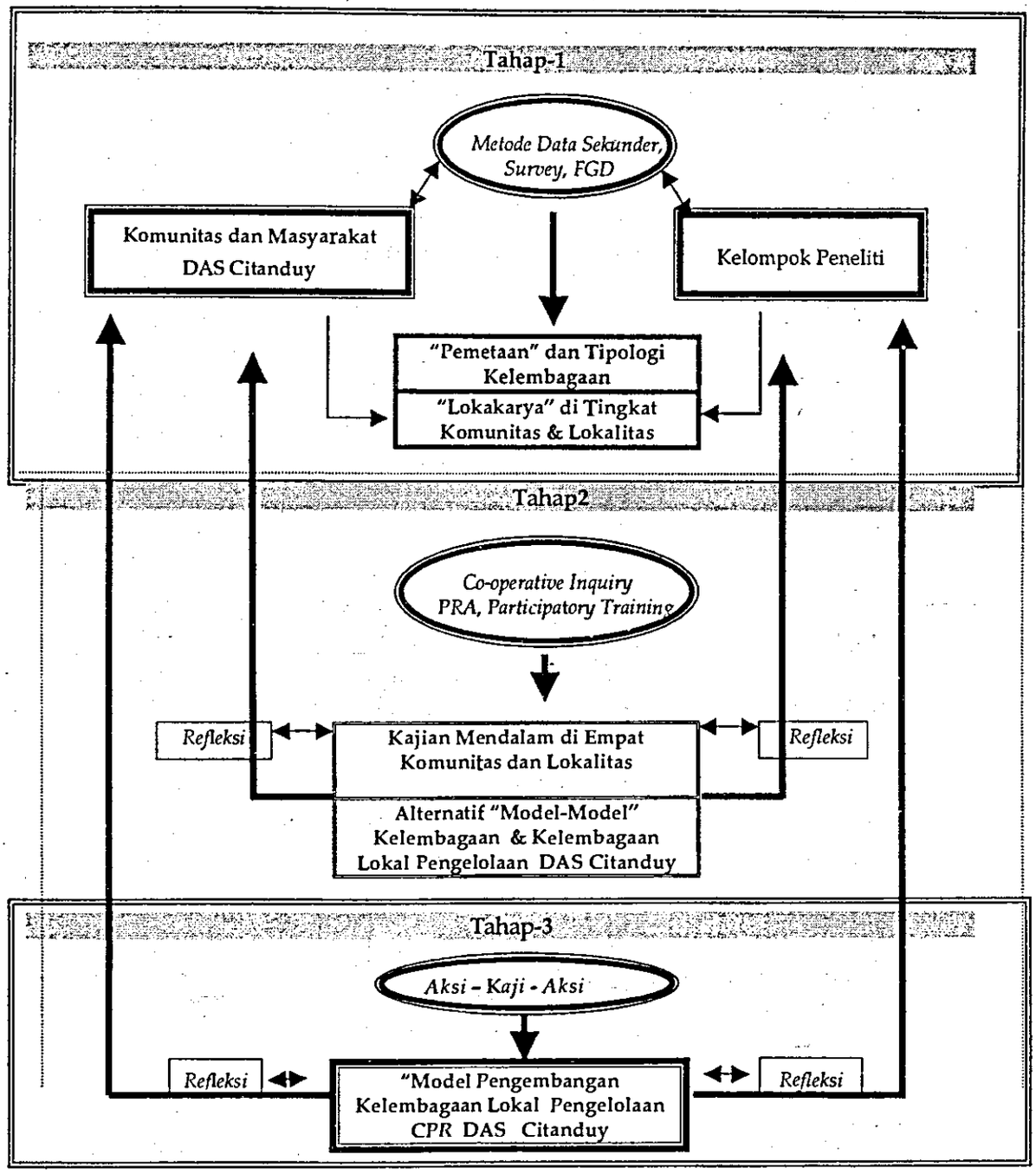

Gambar 3.
Kerangka Metodologis dan Rancangan Kajian Aspek Kelembagaan dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam Daerah Aliran Sungai Citanduy

Kata "alternatif" dan "komunitas dan lokalitas tertentu" menunjukkan bahwa riset ini bertitik-tolak dari asumsi adanya keanekaragaman *(diversity)* masyarakat atau perbedaan struktur sosial sehingga pendekatan pembangunan tidak boleh "seragam". Oleh karena itu, secara makro riset ini harus dimulai dengan menggambarkan keragaman berdasarkan struktur sosial dan beragam issu yang ditelaah. Dengan demikian perlu dilakukan

"pemetaan" yang dapat menggambarkan dengan jelas "tipologi" masyarakat yang dikaji. Secara bertahap rancangan *(design)* riset ini divisualisasikan seperti pada Gambar 3.

Sehubungan dengan itu, aktifitas riset pada Tahap-1 difokuskan kepada "pemetaan" *existing indigenous institutions for good environmental governance* CPR baik di tingkat komunitas setempat maupun kota/kabupaten/regional. Metode kajian yang digunakan pada Tahap-1 ini adalah metode data sekunder dan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Hasil dari proses ini selanjutnya "dilokakaryakan" bersama masyarakat di tingkat komunitas dan lokalitas di DAS Citanduy. Selanjutnya pada Tahap-2 akan digunakan Metode *Cooperative Inquiry, PRA,* dan *Participatory Training* sebagai pendalaman terhadap hasil pemetaan pada Tahap-1. Pada Tahap-3 akan dilakukan Kaji-tindak terhadap alternatif "model" kelembagaan yang direkomendasikan oleh komunitas dan masyarakat serta beragam *stakeholder* di DAS Citanduy. Meskipun demikian, proses kajian ini khususnya dalam aspek kelembagaan tidak bersifat linear tetapi lebih cenderung bersifat siklikal.

3.2. Pemilihan Lokasi dan Sampel

Seperti telah dipaparkan di atas bahwa studi ini menggunakan kombinasi penelitian kuantitatif (metode data sekunder dan survey) dan penelitian kualitatif (metode studi kasus). Untuk kepentingan studi ini dan pertimbangan geo-ekologis dan sosial ekonomi, maka DAS Citanduy dibagi atas: (1) Wilayah Hulu DAS Citanduy; (2) Wilayah Tengah DAS Citanduy; dan (3) Wilayah Hilir DAS Citanduy.

Di Wilayah Hulu DAS Citanduy dipilih dua desa sampel, yaitu: (1) Desa Citamba, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; dan (2) Desa Payung Agung, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Di Wilayah Tengah DAS Citanduy dipilih dua desa sampel, yaitu: (1) Desa Margajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; dan (2) Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat.

Di Wilayah Hilir DAS Citanduy dipilih dua desa sampel, yaitu: (1) Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuluhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah; dan (2) Desa Jeruk Legi Kulon, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Untuk Metode Survey, unit pengamatan dan sasaran penelitian adalah rumahtangga. Kerangka sampling untuk masing-masing wilayah adalah populasi rumahtangga dari setiap desa sampel dari dua desa sampel di setiap wilayah DAS (hulu, tengah, dan hilir). Sampel rumahtangga dipilih dengan menggunakan Metode *Stratified Random Sampling* dengan luas penguasaan lahan sebagai dasar stratifikasi (Lihat Tabel 2).

Untuk Metode Studi Kasus, enam desa sampel tersebut di atas ditetapkan menjadi enam desa kasus sebagai unit pengamatan untuk mendapatkan informasi dan data primer secara mendalam. Fokus pengamatan dalam studi kasus adalah sejumlah informan dari enam desa sampel dan "atas desa" sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik *snowballing*.

Tabel 2. Jumlah Rumahtangga dan Desa Sampel menurut Wilayah Geo-Ekologis dan Sosial Ekonomi menurut Wilayah di DAS Citanduy

No	*Wilayah*	*Lokasi (Desa)*	*Stratifikasi (Ha)*	*Jumlah Sampel*
1	Hulu	1. Citamba 2. Payung Agung	Atas : > 2.47 Menengah : 0.57 - 2.47 Bawah : < 0.57	9 29 21
				59
2	Tengah	1. Margajaya 2. Batulawang	Atas : > 4.12 Menengah : 1.44 - 4.12 Bawah : < 1.44	8 19 12
				39
3	Hilir	1. Bingkeng 2. Jeruk Legi	Atas : > 1.50 Menengah : 0.54 - 1.50 Bawah : < 0.54	9 18 18
				45
Total		Enam Desa Sampel	Atas+Menengah+Bawah	143

Sumber : Data Primer, 2004

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan pendekatan kuantitatif adalah berupa data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang berasal dari berbagai institusi pemerintah dan non-pemerintah, terutama dari Badan Pusat Statistik dan Kantor Startistik yang terdapat di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu juga bersumber dari sumber-sumber sekunder yang ada di tingkat kecamatan dan desa.

Data primer diperoleh melalui Metode Survey dengan menggunakan instrumen kuesioner, yang terintegrasi dengan topik-topik penelitian lain dalam studi ini. Data dikumpulkan melalui wawancara oleh enumerator terhadap responden, yakni kepala rumahtangga sampel.

Demikian pula untuk pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data sekunder dan primer. Data sekunder kualitatif bersumber dari berbagai dokumen yang relevan dengan studi ini. Sedang data primer kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam *(indepth interview)* oleh asisten peneliti terhadap sejumlah responden dan informan. Di samping itu dilakukan pula wawancara kelompok dan *Focus Group Discussion* (Krueger, 1988 dan Morgan, 1988). Seluruh hasil wawancara "direkam" dalam catatan harian dalam bentuk suatu manuskrip data kualitatif.

3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari kajian ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu data di peringkat: (1) individu; (2) kelembagaan; dan (3) satuan wilayah DAS. Ketiga kumpulan data tersebut terdiri dari dua jenis: (1) Data Kuantitatif; dan (2) Data Kualitatif

statistika non-parametrik, terutama untuk membangun tipologi kelembagaan. Analisis data untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel menggunakan analisis korelasi, dan keragaman. Sedangkan untuk menentukan faktor penentu diantara variabel-variabel bebas, disamping korelasi juga menggunakan analisis statistik deskriptif juga tetap diperlukan untuk melihat keragaan dari data yang diolah. Seluruh data diolah dengan komputer menggunakan program paket SPSS V 9.01, dimana sebelumnya database disiapkan menggunakan program dBase dan Microsoft Excell.

Pengolahan dan analisis data kualitatif dalam bentuk catatan lapangan (catatan harian) dilakukan dengan Analisis Isi (Patton, 1990), yakni seluruh konsep dan variabel dianalisis dengan menggunakan teknik ini berdasarkan pandangan subyek yang dikaji (*emic*).

BAB IV

KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS LOKAL

Kelembagaan komunitas lokal dalam studi ini - dengan merujuk kepada pemahaman kelembagaan menurut Bertrand (1974): "kelembagaan adalah tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi, dan sistem sosial lainnya" - difokuskan kepada wujud kongkritnya berupa kelompok dan organisasi sosial yang berada di tingkat komunitas desa. Kelompok dan organisasi sosial tersebut adalah yang "terkait" dengan aktivitas konservasi sumberdaya alam dan sosial ekonomi dalam wilayah DAS Citanduy. Kelompok dan organisasi sosial tersebut dapat berupa kelompok tani, kelompok UPSA, kelompok Model Farm, kelompok konservasi, kelompok usaha bersama ekonomi, kelompok simpan-pinjam, organisasi koperasi, Koperasi Unit Desa, dan organisasi lembaga keswadayaan masyarakat di tingkat komunitas desa.

Tingkat kemampuan beradaptasi kelembagaan *grassroots* terhadap proses-proses perubahan sosial yang terjadi ditunjukkan dengan sampai sejauh mana tingkat keberlanjutan kelembagaan tersebut *(institutional sustainability)*. Dalam studi ini, ukuran tingkat keberlanjutan kelembagaan dalam studi ini dinilai berdasarkan variabel-variabel: (1) peran serta anggota; (2) pelayanan terhadap anggota; (3) manfaat lembaga bagi anggota; (4) good governance; dan (5) kompleksitas. Dengan menggunakan kelima variabel tersebut dapat diukur tingkat keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal di DAS Citanduy. Selanjutnya, dari kelima variabel tersebut diidentifikasi variabel-variabel yang menentukan tingkat keberlanjutan kelembagaan.

Dalam bab ini, selain dipaparkan tingkat keberlanjutan keiembagan komunitas lokal, juga dianalisis faktor-faktor internal dan eksternal, sebagai *determinant factors*, yang mempengaruhi keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal. *Determinant factors* tersebut, sebagai variabel-variabel independen dalam studi ini, meliputi: (1) kepemimpinan; (2) pendidikan anggota; (3) aturan tertulis; (4) aturan tidak tertulis; (5) ukuran kelembagaan; (6) intervensi pemerintah yang berdampak positif; (7) intervensi pemerintah yang berdampak negatif; (8) ketersediaan prasarana dan sarana umum; (9) jejaring kerjasama antar kelembagaan; (10) usia kelembagaan; (11) proses pendirian kelembagaan; dan (12) kecukupan anggaran.

4.1. Faktor-Faktor Penentu Keberlanjutan Kelembagaan

Dari lima variabel yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan kelembagaan *(institutional sustainability)* komunitas lokal, berdasarkan analisis faktor dan dengan menggunakan *coefisien variance* masing-masing variabel (Tabel 3), maka dapat diidentifikasi tiga faktor penentu kebelanjutan kelembagaan komunitas lokal, yakni: (1) peranserta anggota; (2) pelayanan terhadap anggota; dan (3) *good governance*.

Tabel 3. *Coefisien Variance* Lima Variabel Penentu Keberlanjutan Kelembagaan Komunitas Lokal di DAS Citanduy

No	Kelembagaan	Variabel Penentu				
		Peranserta	Pelayanan	Manfaat	*Good Governance*	Kompleksitas
1	Wilayah Hulu					
	• Citamba	39.84	39.81	28.99	50.04	23.35
	• Payung Agung	46.34	39.38	18.25	51.70	37.52
2	Wilayah Tengah					
	• Margajaya	71.19	73.55	54.33	51.79	22.54
	• Batulawang	39.06	41.68	25.74	53.38	32.17
3	Wilayah Hilir					
	• Bingkeng	42.31	33.28	18.29	51.30	35.72
	• Jeruk Legi	23.20	25.74	30.91	53.88	11.49
		48.35	49.81	34.59	59.73	26.61

Sumber : Data Primer, 2004

Ketiga faktor tersebut memiliki tingkat sensitifitas yang relatif tinggi dibandingkan dengan dua faktor lainnya dalam menentukan kebelanjutan kelembagaan komunitas lokal. Dari ketiga faktor penentu tersebut, *good governance* memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi, yang kemudian diikuti oleh pelayanan terhadap anggota dan peranserta anggota. Oleh karena itu, ketiga faktor penentu tersebut selanjutnya digunakan untuk mengukur tingkat keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal di DAS Citanduy

4.2. Tingkat Keberlanjutan Kelembagaan

Tingkat keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal dalam studi ini diukur dengan menggunakan total skor dari faktor-faktor penentu keberlanjutan kelembagaan tersebut. Dari total skor faktor-faktor penentu tersebut dapat dianalisis tingkat keberlanjutan kelembagaan pada masing-masing wilayah DAS lokasi studi. Dengan rata-rata skor dari tiga tipe kelembagaan komunitas lokal (kelembagaan produksi, konservasi, dan koperasi), dapat diidentifikasi wilayah DAS Citanduy dengan tingkat keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal nya (Tabel 4).

Dari studi ini (Tabel 4) dapat diidentifikasi bahwa, di DAS Citanduy (dengan enam desa sampel di tiga wilayah), tingkat keberlanjutan kelembagaan tertinggi dimiliki oleh kelembagaan konservasi, sedang yang terendah dimiliki kelembagaan produksi. Selanjutnya, apabila diantara keenam desa sampel tersebut dibandingkan, maka Desa Payung Agung adalah desa yang memiliki kelembagaan komunitas lokal yang tertinggi tingkat keberlanjutannya. Sedangkan yang terendah tingkat keberlanjutan kelembagaannya adalah Desa Batulawang. Sedangkan menurut wilayah geo-ekologis dan sosial ekonomi DAS Citanduy, wilayah hilir memiliki tingkat kelembagaan berkelanjutan yang tertinggi, kemudian diikuti oieh wilayah hulu dan tengah.

Masih membanding diantara ketiga wilayah geo-ekologis dan sosial ekonomi, maka dapat diidentifikasi bahwa di wilayah hulu dan tengah kelembagaan konservasi memiliki tingkat keberlanjutan yang tertinggi, sedang yang terendah di wilayah hulu

adalah pada kelembagaan koperasi dan di wilayah tengah yang terendah adalah pada kelembagaan produksi. Di wilayah hilir, kelembagaan koperasi merupakan kelembagaan dengan tingkat keberlanjutan yang tertinggi, sedang yang terendah adalah pada kelembagaan konservasi.

Dengan perspektif lain, apabila membandingkan antara ketiga tipe kelembagaan di DAS Citanduy, maka dapat diidentifikasi bahwa kelembagaan konservasi merupakan kelembagaan dengan tingkat keberlanjutan yang tertinggi. Sedangkan yang terendah tingkat keberlanjutannya kelembagaannya adalah pada kelembagaan produksi. Perspektif ini juga menunjukkan, bahwa kelembagaan koperasi yang tertinggi tingkat keberlanjutannya terdapat di wilayah hilir. Kelembagaan produksi yang tertinggi tingkat keberlanjutannya terdapat di wilayah hilir. Kelembagaan konservasi yang tertinggi tingkat keberlanjutannya adalah di wilayah hulu DAS Citanduy. Dengan demikian, secara keseluruhan cukup sahih untuk menilai bahwa wilayah hilir DAS Citanduy memiliki tingkat keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal tertinggi di DAS Citanduy.

Tabel 4. Skor Keberlanjutan Kelembagaan menurut Wilayah dan Tipe Kelembagaan di DAS Citanduy

No	*DAS Citanduy*	*Skor Kelembagaan*			*Total*
		Produksi	*Konservasi*	*Koperasi*	
1	Wilayah Hulu				
	• Citamba	11.25	43.82	22.34	20.51
	• Payung Agung	35.87	43.82	23.25	33.76
2	Wilayah Tengah				
	• Margajaya	25.15	38.65	31.25	28.73
	• Batulawang	21.50	23.08	15.87	18.27
3	Wilayah Hilir				
	• Bingkeng	28.25	24.33	44.62	32.71
	• Jeruk Legi	33.59	22.68	41.22	31.28
Total		22.35	35.87	25.14	26.35

Sumber : Data Primer, 2004

4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Kelembagaan

Berdasarkan analisis korelasi antara variabel-variabel bebas dan tak bebas (Tabel 5), dapat diidentifikasi bahwa dari sejumlah variabel independen ternyata hanya empat variabel yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kelembagaan *grassroots*. Keempat variabel tersebut adalah: (1) intervensi positif pemerintah; (2) jejaring kerjasama; (3) kecukupan anggaran; dan (4) aturan-aturan tertulis.

Dari keempat variabel yang mempengaruhi keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal ternyata selain faktor internal seperti aturan-aturan tertulis dan faktor ekstemal seperti intervensi positif pemerintah, keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal secara umum dipengaruhi pula oleh kekuatan-kekuatan yang dibangun dari dalam dan luar kelembagaan tersebut, seperti jejaring kerjasama dan kecukupan anggaran.

Tabel 5. Koefisien Korelasi antara Variabel-Variabel Independen dan Variabel-Variabel Dependen

No	Variabel Dependen	*Constant*	Variabel Independen			
			Jejaring	Intervensi	Anggaran	Aturan Tertulis
1	Peranserta	1.5247	0.6257	0.7239	-	-
2	Pelayanan	0.8424	0.5348	0.5047	0.4651	0.3423
3	Manfaat	1.9413	0.3793	-	-	0.4784
4	*Good Governance*	1.8372	-	0.5025	0.4370	-
5	Kompleksitas	2.6840	-	0.1431	0.2176	-

Sumber : Data Primer, 2004

Dengan demikian, secara umum upaya-upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal di DAS Citanduy perlu memfokuskan pada program-program aksi mengenai pengembangan jejaring kerjasama dan kecukupan anggaran. Intervensi positif pemerintah perlu dilakukan sampai pada batas-batas untuk mengakomodasi pengembangan jejaring kerjasama dan penyedia anggaran yang cukup sehingga tidak menimbulkan ketergantungan. Disamping itu, norma-norma yang mengarahkan dinamika kelembagaan *grassroots* perlu berlandaskan suatu aturan-aturan tertulis yang cenderung lebih bersifat obyektif, transparansi, dan *accountable*.

4.4. Ikhtisar

Hasil studi ini, dengan menggunakan metode survei terhadap sejumlah responden menurut tiga tipe kelembagaan komunitas lokal, mengidentifikasi bahwa faktor-faktor penentu keberlanjutan kelembagaan adalah: (1) pelayanan terhadap anggota; (2) peranserta anggota; dan (3) *good governance*. Dengan menggunakan rata-rata skor ketiga faktor penentu tersebut dapat diukur tingkat keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal.

Berdasarkan wilayah geo-ekologis dan sosial ekonomi DAS maka dapat diidentifikasi bahwa wilayah hilir adalah wilayah yang memiliki tingkat keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal yang tertinggi. Kelembagaan konservasi merupakan kelembagaan dengan tingkat kerberlanjutan tertinggi di wilayah hulu dan tengah DAS Citanduy. Sedangkan kelembagaan koperasi merupakan kelembagaan dengan tingkat keberlanjutan tertinggi di wilayah hilir DAS Citanduy. Sedangkan berdasarkan tipe-tipe kelembagaan komunitas lokal, maka dapat dirumuskan bahwa kelembagaan konservasi merupakan kelembagaan komunitas lokal yang memiliki tingkat keberlanjutan yang tertinggi.

Studi ini juga berhasil merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal, yaitu: (1) jejaring kerjasama; (2) intervensi positif pemerintah; (3) kecukupan anggaran; dan (4) aturan-aturan tertulis. Dengan demikian, melalui program-program pengembangan jejaring kerjasama, intervensi pemerintah, kecukupan pangan, dan aturan-aturan tertulis dapat meningkatkan keberlanjutan kelembagaan *grassroots* di DAS Citanduy.

BAB V

ANALISIS TIPOLOGI KELEMBAGAAN KOMUNITAS LOKAL

Survey terhadap berbagai tipe kelembagaan komunitas lokal di tiga wilayah DAS menghasilkan tiga faktor penentu dan keragaman atau variasi tingkat keberlanjutan kelembagaan yang dapat dikategorikan dari tingkat keberlanjutan yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sejak awal sangat diharapkan bahwa hasil studi empiris ini dapat dijadikan landasan bagi aksi pengembangan kelembagaan. Oleh karena itu, di satu sisi sedapat mungkin tidak mereduksi keragaman tingkat keberlanjutan kelembagaan dan di sisi lain perlu upaya yang mampu mengurangi pembiayaan aksi pengembangan kelembagaan tersebut, perlu dirumuskan suatu tipologi kelembagaan komunitas lokal berdasarkan kenyataan empiris di DAS Citanduy.

Dengan tipologi kelembagaan tersebut, studi ini dapat "memetakan" kondisi dan proses perkembangan kelembagaan *grassroots* di DAS Citanduy. Berdasarkan "Peta Kelembagaan DAS Citanduy" yang dilengkapi dengan informasi mengenai "sejarah perkembangan" dan "kasus-kasus yang khas" mengenai kelembagaan diharapkan dapat dirumuskan suatu strategi yang tidak "pukul-rata" untuk semua wilayah dan tipe kelembagaan komunitas lokal. Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan tipologi kelembagaan dengan kerangka konseptual dan hasil kajian empirisnya.

5.1. Kerangka Konseptual Tipologi Kelembagaan

Kerangka konseptual tipologi kelembagaan komunitas lokal ini merupakan suatu "abstraksi" terhadap hasil kajian empiris yang dilakukan dengan metode survey. Kajian empiris tersebut mengidentifikasi tiga faktor penentu keberlanjutan kelembagaan, yaitu: (1) pelayanan terhadap anggota; (2) peranserta anggota; dan (3) *good governance*. Dari Perspektif *Social Capital*, yang intinya membangun dan mengembangkan jejaring *(networking)*, dapat dijelaskan bahwa interaksi atau "keseimbangan dinamis" antara "pelayanan" dan "peranserta" merupakan suatu modal sosial kelembagaan yang mengindikasikan bahwa secara kelembagaan dicapai suatu "keberhasilan proses manajemen". Sedangkan *good governance* mengindikasikan bahwa telah terjadi proses pelembagaan pada kelembagaan komunitas lokal yang berlandaskan pada prinsip-prinsp demokrasi, transparansi, dan akauntabilitas.

Dengan dua variabel di atas: "keseimbangan pelayanan-peranserta" dan "good governance", studi ini mengkonstruksikan tipologi kelembagaan tdalam bentuk kuadran. Suatu garis kontinum horizontal (ordinat) menggambarkan tingkat keberhasilan proses manajemen yang diindikasikan dengan rendah sampai tinggi "keseimbangan pelayanan-peranserta" dalam suatu kelembagaan. Garis vertikal (absis) mengambarkan tidak berfungsi *(bad governance)* sampai dengan berfungsinya *good governance*. "Perpotongan" garis ordinat dan absis tersebut di atas membentuk suatu "model" kuadran atau tipologi kelembagan komunitas lokal. Kuadran Pertama (Tipe-1) adalah "ruang" yang disediakan bagi sejumlah kelembagaan yang memiliki tingkat "keseimbangan pelayanan-peranserta" tinggi dan berfungsinya prinsip-prinsip *good governance*.

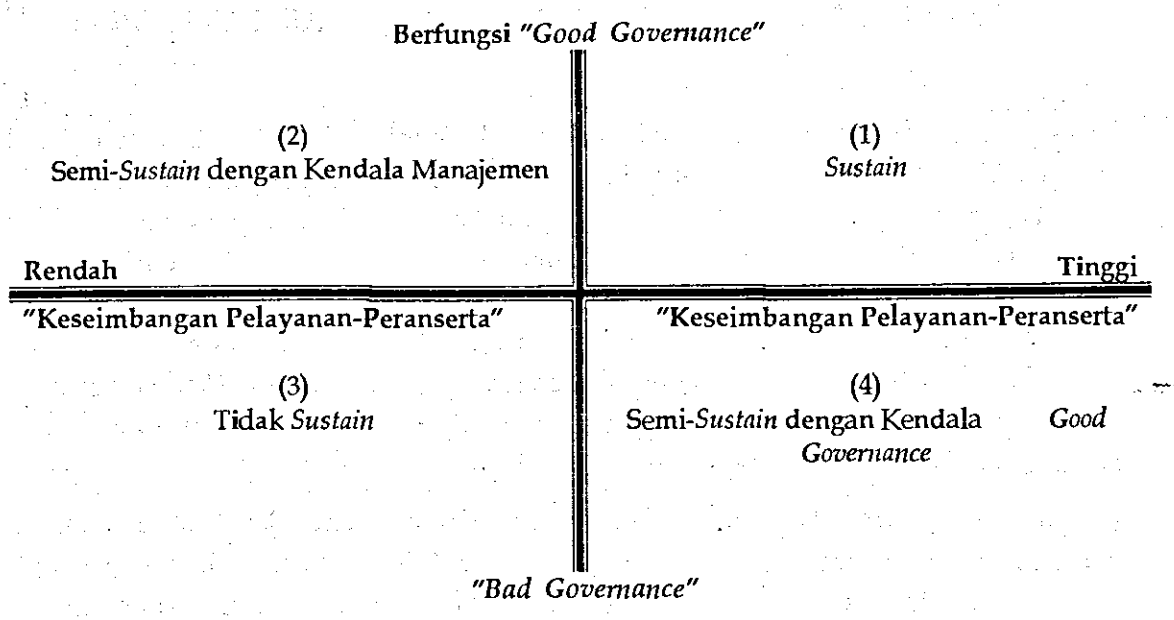

Gambar 4.
Tipologi Kelembagaan Komunitas Lokal

Dalam Kuadran Pertama ini kelembagaan komunitas lokal merupakan suatu kelembagaan yang sustain. Kuadran Kedua (Tipe-2) adalah "ruang" yang menjadi tempat bagi sejumlah kelembagaan yang memiliki tingkat "keseimbangan pelayanan-peranserta" rendah, tetapi prinsip-prinsip *good governance* nya berfungsi. Dalam Kuadran Kedua ini kelembagaan komunitas lokal merupakan suatu kelembagaan yang semi-sustain dengan kendala manajemen . Kuadran Ketiga (Tipe-3) adalah "ruang" yang menjadi tempat bagi sejumlah kelembagaan yang memiliki tingkat "keseimbangan pelayanan-peranserta" rendah dan tidak berfungsinya prinsip-prinsip *good governance* atau *bad governance*. Dalam Kuadran Ketiga ini kelembagaan merupakan kelembagaan-kelembagaan yang tidak sustain. Terakhir, Kuadran Keempat (Tipe-4) adalah ruang yang disediakan bagi sejumlah kelembagaan yang memiliki tingkat "keseimbangan pelayanan-peranserta" tinggi, tetapi prinsip-prinsip *good governance* nya tidak berfungsi atau *bad governance*. Dalam Kuadran Keempat ini kelembagaan komunitas lokal merupakan kelembagaan yang semi-sustain dengan kendala *good governance* (Gambar 4).

5.2. Tipologi Kelembagaan

Berdasarkan analisis dari Tabel 6 dan Gambar 5 maka dapat ditunjukkan bahwa sebanyak 20.3 persen responden menilai bahwa kelembagaan komunitas lokal di DAS Citanduy adalah kelembagaan yang berkelanjutan. Kelembagaan yang dikategorikan sebagai kelembagaan yang semi sustain dengan kendala manajemen dinilai oleh sebanyak 33.6 persen responden. Sebanyak 36.4 persen responden menilai kelembagaan komunitas lokal dikategorikan sebagai kelembagaan yang tidak berkelanjutan. Sedangkan sebanyak 9.7 persen responden menilai kelembagaan di DAS Citanduy ini dikategorikan sebagai kelembagaan yang semi-berkelanjutan dengan kendala *good governance*.

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Responden yang Menilai Kelembagaan menurut Wilayah dan Tipologi di DAS Citanduy

No	DAS Citanduy	Tipe-1		Tipe-2		Tipe-3		Tipe-4		Total	
		N	Persen	N	Persen	N	Persen	N	Persen	N	Persen
1	Hulu	14	23.7	15	25,4	27	45.8	3	5.1	59	100,0
2	Tengah	6	15,4	13	33,3	13	33.3	7	17.9	39	100,0
3	Hilir	9	20,0	20	44.4	12	26.7	4	8.9	45	100,0
	Total	29	20.3	48	33.6	52	36.4	14	9.7	143	100.0

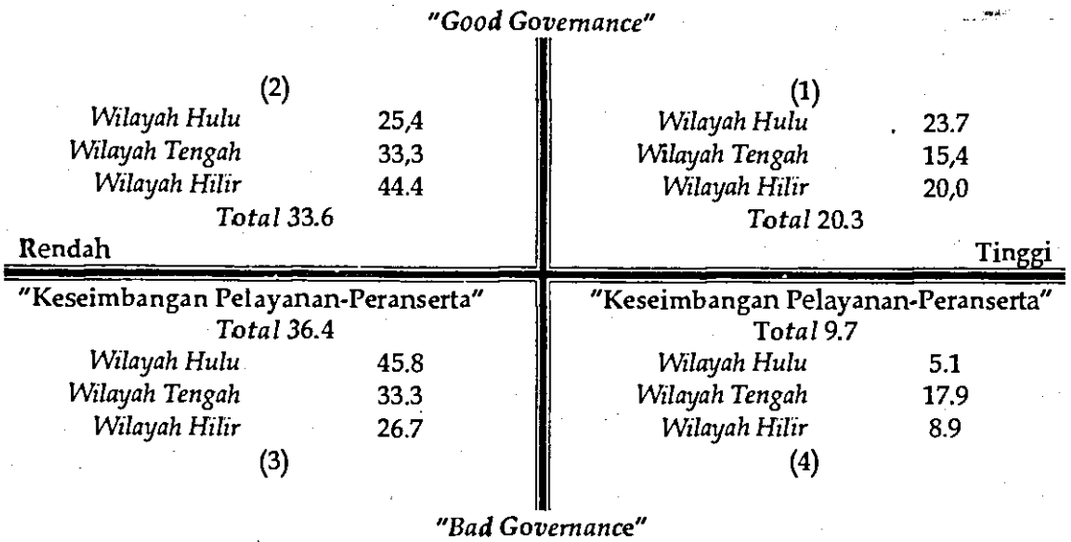

Sumber : Data Primer, 2004

Gambar 5.
Tipologi Kelembagaan Komunitas Lokal menurut Wilayah dan Tipologi di DAS Citanduy

Apabila dianalisis berdasarkan pembagian wilayah di DAS Citanduy, maka dapat diidentifikasi bahwa kelembagaan-kelembagaan komunitas lokal di wilayah hulu adalah wilayah yang memiliki persentase tertinggi (23.7 persen) kelembagaan yang berkelanjutan. Kelembagaan yang tidak berkelanjutan terbanyak (45.8 persen) juga terdapat di wilayah hulu DAS Citanduy. Kelembagaan komunitas lokal yang dikategorikan sebagai kelembagaan semi sustain dengan kendala manajemen terbanyak terdapat di wilayah hilir (44.4 persen). Sedangkan kelembagaan yang dikategorikan sebagai kelembagaan semi sustain dengan kendala *good governance* terbanyak terdapat di wilayah tengah (17.9 persen).

Analisis selanjutnya, ditelaah lebih rinci berdasarkan jenis kelembagaan dan tipologi kelembagaan (Tabel 7 dan Gambar 6), menunjukkan bahwa 24.5 persen responden menilai bahwa kelembagaan konservasi adalah kelembagaan yang sustain dibandingkan dengan kelembagaan produksi (16.3 persen) dan kelembagaan koperasi (20.0 persen). Sebanyak 40.8 persen responden menilai bahwa kelembagaan konservasi adalah kelembagaan yang tidak sustain dan penilaian ini relatif tinggi dibandingkan penilaian responden terhadap kelembagaan produksi dan koperasi.

Kelembagaan yang dikategorikan sebagai kelembagaan yang semi sustain dengan kendala manajemen terbanyak dinilai oleh responden (37.8 persen) pada kelembagaan

koperasi. Tipe yang keempat, yakni kelembagaan yang semi sustain dengan kendala *good governance*, terbanyak dinilai oleh responden (12.3 persen) pada kelembagaan produksi.

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Responden yang Menilai Kelembagaan menurut Tipe Kelembagaan dan Tipologi di DAS Citanduy

No	Kelembagaan	Tipe-1		Tipe-2		Tipe-3		Tipe-4		Total	
		N	Persen	N	Persen	N	Persen	N	Persen	N	Persen
1	Produksi	8	16.3	18	36.7	17	34.7	6	12.3	49	100,0
2	Konservasi	12	24.5	13	26.5	20	40.8	4	8.2	49	100,0
3	Koperasi	9	20.0	17	37.8	15	33.3	4	8.9	45	100,0
	Total	29	20.3	48	33.6	52	36.4	14	9.7	143	100.0

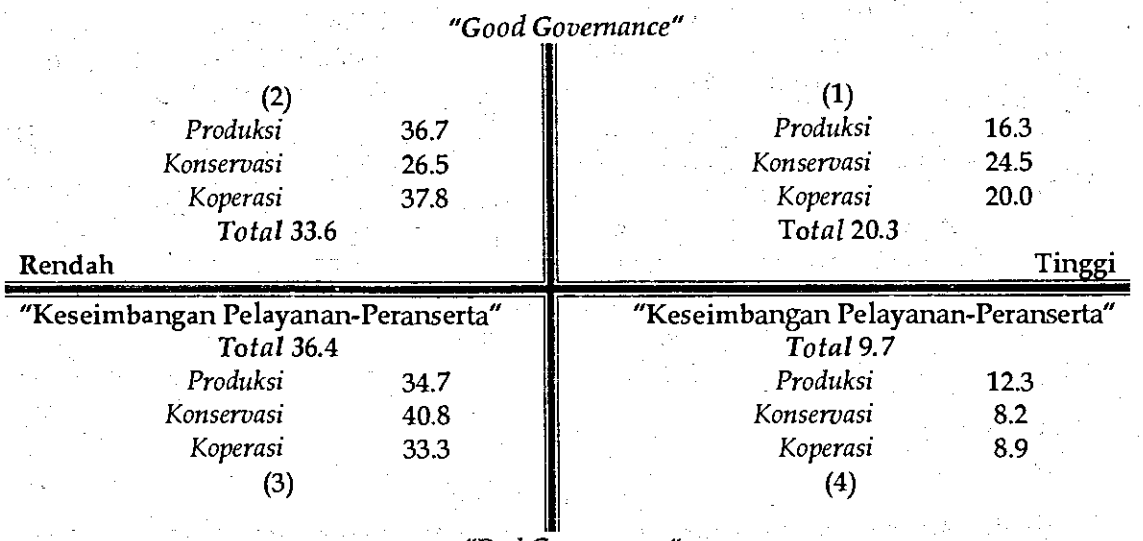

Sumber : Data Primer, 2004

Gambar 6.
Tipologi Kelembagaan Komunitas Lokal menurut Tipe Kelembagaan dan Tipologi di DAS Citanduy

5.3. Pola Hubungan Kelembagaan

Hubungan kelembagaan (*networking*) diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kelembagaan *grassroots* di DAS Citanduy. Dari Perspektif Modal Sosial (*Social Capital*) hubungan kelembagaan tersebut merupakan *"added value"* dari kelembagaan-kelembagaan yang "relevan" dengan pengelolaan DAS Citanduy. Akan tetapi agar hubungan kelembagaan tersebut memberikan nilai tambah bagi semua kelembagaan yang berkepentingan (*stakeholders*) dan berperanserta (*shareholders*), maka hubungan kelembagaan tersebut perlu memiliki basis komunitas lokal yang jelas dan mengakar pada struktur dan kultur komunitas di DAS Citanduy.

Seperti telah dijelaskan pada bagian awal bab ini, khususnya mengenai kelembagaan, bahwa secara konseptual berbagai *stakeholders* yang berperanserta tersebut dapat dikategorikan menjadi *public sector, private sector,* dan *collective action sector.* Permasalahannya adalah bagaimana mengembangkan hubungan kelembagaan diantara

ketiga sektor pembangunan tersebut. Dari paparan, secara implisit dapat dipahami bahwa masing-masing kategori kelembagaan pembangunan tersebut telah berperan di wilayah tersebut. Akan tetapi, peran tersebut berjalan dengan ego-sektomya masing-masing, belum tampak suatu kekuatan yang merupakan sinerji dari tiga kategori kelembagaan tersebut yang terjalin dalam suatu bentuk hubungan kelembagaan.

Peranan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam hubungan kelembagaan adalah menjadi fasllitator atau *"server"* di tingkat nasional dan regional untuk menggerakkan berbagai stakeholders yang berperanserta dalam pengembangan kelembagaan komunitas lokal tersebut. Di samping itu, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan kebijakan dan wewenangnya berperan membuka peluang pasar bagi produk yang dihasilkan dari aktivitas kelembagaan tersebut.

Secara vertikal, pemerintah pusat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah lokal dan masyarakat di tingkat komunitas. Pada tahap awal, tidak hanya insentif finansial (alternatif sumber dan skim pembiayaan) tetapi juga insentif kelembagaan (pelatihan) yang diperlukan dari kebijakan pemerintah pusat terhadap berbagai stakeholders di DAS Citanduy.

Sedangkan pemerintah daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang wilayah termasuk dalam kawasan DAS Citanduy juga berperan sebagai fasilitator dan "server" di tingkat provinsi untuk menggerakkan dan mensinerjikan kekuatan-kekuatan berbagai stakeholders di tingkat tersebut. Kebijakan daerah berupa regulasi dan insentif (sebagai contoh dalam pembaentukan Dewan Air) yang cenderung mempermudah pembangunan dan pengembangan di DAS Citanduy. Secara spesifik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah perlu memfasilitasi keperluan sarana fisik dan arealnya dengan *property rights* yang jelas dan transparan. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten berpeluang untuk sharing dalam pengelolaan DAS Citanduy.

Dengan demikian, peranan pemerintah pusat lebih banyak sebagai "server" di tingkat nasional dan memberikan insentif finansial, insentif kelembagaan, serta membuka peluang pasar. Sedangkan peranan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah , selain sebagai "server" di tingkat lokal juga mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang cenderung mempermudah pengelolaan DAS Citanduy, fasilitasi dan penyediaan sarana dan areal dengan property rights yang jelas dan transparan.

Kelembagaan swadaya masyarakat lokal diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan DAS Citanduy. Peranan kelembagaan ini lebih banyak diarahkan untuk pemberdayaan kelembagaan-kelembagaan masyarakat di tingkat komunitas melalui jalur ekonomi dan pendidikan & pelatihan dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat partisipatif.

Pengalaman kelembagaan swadaya lokal dengan pendekatan partisipatif, dapat dijadikan "model" peranan kelembagaan swadaya tersebut dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan komunitas lokal di DAS Citanduy . Dengan metode-metode partisipatif, diharapkan kelembagaan swadaya tersebut dapat mengubah strategi perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi di tingkat kelembagaan *grassroots*. Hal ini penting, karena selama ini pengembangan kelembagaan sangat tergantung pada

sistem patemalistik yang besar ketergantungannya pada tokoh-tokoh formal dan informal setempat.

Pembangunan dan pengembangann hubungan kelembagaan atau jejaring kelembagaan untuk mendukung pengelolaan DAS Citanduy melibatkan berbagai kelembagaan yang dapat dikategorikan sebagai *stakeholders* maupun *shareholders*. Peranserta berbagai kelembagaan tersebut dalam hubungan kelembagaan berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan, partisipatif, kompetensi dan transparansi.

Hubungan kelembagaan tersebut perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Secara institusional, hubungan kelembagaan tersebut tidak sama dengan badan-badan koordinasi yang cenderung memerlukan pembiayaan yang besar. Oleh karena itu peranan suatu kelembagaan tertentu sebagai "server" secara periodik menjadi sangat penting. Bentuk hubungan kelembagaan tersebut sebaiknya bersifat "longgar" tidak ketat seperti suatu organisasi yang sangat formal dan hubumgan tersebut harus berbasis komunitas lokal. Tanpa basis seperti itu, sulit diharapkan tujuan dari pengelolaan DAS Citabduy tercapai. Dengan demikian hubungan kelembagaan umtuk mendukung pengelolaan DAS Citanduy merupakan jalinan barbagai stakeholders dan shareholders baik secara horisontal maupun vertikal yang berbasis pada komunitas lokal.

5.4. Ikhtisar

Tipologi kelembagaan komunitas lokal "dikonstruksi" berdasarkan dua variabel pokok, yaitu: (1) Tinggi-rendahnya "keseimbangan pelayanan-peranserta" dalam suatu kelembagaan; dan (2) Berfungsi-tidaknya *good governance* dalam suatu kelembagaan. Berdasarkan kedua variable pokok tersebut dari tipologi kelembagaan diidentifikasi empat tipe kelembagaan, yakni: (1) Tipe-1, kelembagaan yang sustain; (2) Tipe-2, kelembagaan semi-sustain dengan kendala manajemen; (3) Tipe-3, kelembagaan yang tidak-sustain; dan (4) Tipe-4, kelembagaan semi-sustain dengan kendala *good governance*.

Berdasarkan analisis dapat dirumuskan bahwa sebanyak 20.3 persen responden menilai bahwa kelembagaan komunitas lokal di DAS Citanduy adalah kelembagaan yang berkelanjutan. Kelembagaan yang dikategorikan sebagai kelembagaan yang semi sustain dengan kendala manajemen dinilai oleh sebanyak 33.6 persen responden. Sebanyak 36.4 persen responden menilai kelembagaan komunitas lokal dikategorikan sebagai kelembagaan yang tidak berkelanjutan. Sedangkan sebanyak 9.7 persen responden menilai kelembagaan di DAS Citanduy ini dikategorikan sebagai kelembagaan yang semi-berkelanjutan dengan kendala *good governance*.

Berdasarkan wilayah geo-ekologis dan sosial ekonomi DAS Citanduy dapat diidentifikasi bahwa kelembagaan-kelembagaan komunitas lokal di wilayah hulu adalah wilayah yang memiliki persentase tertinggi (23.7 persen) kelembagaan yang berkelanjutan. Kelembagaan yang tidak berkelanjutan terbanyak (45.8 persen) juga terdapat di wilayah hulu DAS Citanduy. Kelembagaan komunitas lokal yang dikategorikan sebagai kelembagaan semi sustain dengan kendala manajemen terbanyak terdapat di wilayah hilir (44.4 persen). Sedangkan kelembagaan yang dikategorikan sebagai kelembagaan semi sustain dengan kendala *good governance* terbanyak terdapat di wilayah tengah (17.9 persen).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa 24.5 persen responden menilai bahwa kelembagaan konservasi adalah kelembagaan yang sustain dibandingkan dengan kelembagaan produksi (16.3 persen) dan kelembagaan koperasi (20.0 persen). Sebanyak 40.8 persen responden menilai bahwa kelembagaan konservasi adalah kelembagaan yang tidak sustain dan penilaian ini relatif tinggi dibandingkan penilaian responden terhadap kelembagaan produksi dan koperasi. Kelembagaan yang dikategorikan sebagai kelembagaan yang semi sustain dengan kendala manajemen terbanyak dinilai oleh responden (37.8 persen) pada kelembagaan koperasi. Tipe yang keempat, yakni kelembagaan yang semi sustain dengan kendala *good governance*, terbanyak dinilai oleh responden (12.3 persen) pada kelembagaan produksi.

BAB VI

POLA DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS LOKAL

Seperti telah dipaparkan pada bab sebelumnya, analisis kelembagaan dilakukan menurut pembagian wilayah DAS Citanduy: hulu, tengah, dan hilir dan menurut jenis kelembagaan komunitas lokal, yakni kelembagaan produksi, konservasi, dan koperasi. Hasil pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa ketiga jenis kelembagaan komunitas lokal tersebut yang dominan memberikan warna pada pengelolaan DAS Citanduy di tingkat komunitas lokal. Oleh karena itu, untuk mempertahankan konsistensi analisis kelembagaan tersebut, maka dalam bab ini pola dan dinamika perkembangan kelembagaan juga ditelaah menurut pembagian wialayah DAS Citanduy dan tiga jenis kelembagaan komunitas lokal tersebut.

Kelembagaan produksi, khususnya kelompoktani, adalah kelompok pada kesatuan terkecil yang dibentuk di kalangan petani, untuk menggalang persatuan anggota-anggotanya dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi budidaya pertanian dan memanfaatkannya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani di DAS Citanduy.

Kelembagaan konservasi, khususnya kelompok UPSA dan Model Farm, adalah kelompok pada kesatuan terendah – pada umumnya pengguna sesuatu model konservasi- yang dibentuk di kalangan petani di wilayah hulu, untuk menggalang persatuan anggota-anggotanya dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi konservasi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan produksi, mengurangi erosi dan pencemaran sungai, dan pendapatan usahatani di DAS Citanduy.

Kelembagaan koperasi, khususnya kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE) dan Koperasi Unit Desa (KUD), adalah kelompok warga masyarakat di DAS Citanduy yang dibentuk untuk menggalang persatuan mereka dalam usaha-usaha ekonomi yang disebutkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu, khususnya yang dipandu dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1978 Tentang Badan Usaha Unit Desa (BUUD) / Koperasi Unit Desa (KUD).

Pola perkembangan kelembagaan produksi, konservasi, dan koperasi dipelajari dalam tiap wilayah DAS Citanduy dengan pendekatan sejarah dari sumber informasi dokumen maupun nara sumber yang digali dengan wawancara semi terstruktur.

6.1. Kehadiran Kelembagaan Komunitas Lokal

Berbagai kelembagaan tradisional dalam kenyataannya sudah dibentuk dan dimanfaatkan oleh petani dan warga masyarakat lainnya sejak sebelum 1945 di DAS Citanduy. Banyak di antara mereka secara historis merupakan akar budaya, bahkan ada diantaranya yang "menjelma" menjadi kelembagaan produksi, konservasi, dan koperasi yang kita kenal sekarang. Kelembagaan produksi, konservasi, dan koperasi yang kita kenal sekarang di tiga wilayah DAS Citanduy mulai hadir pada tahun-tahun yang hampir

bersamaan. Kehadiran kelembagaan-kelembagaan tersebut yang berdiri pada tahun yang hampir bersamaan di tiga wilayah DAS Citanduy, pada umumnya karena kelembagaan tersebut dibentuk dan dihadirkan atas inisiatif Pemerintah Pusat.

Kelompoktani adalah kelembagaan yang diperkenalkan oleh Pemerintah Pusat dan dengan instruksi dari Departemen Pertanian dimintakan kepada Dinas Pertanian untuk didiseminasikan kepada hamparan-hamparan sawah untuk mendukung upaya swa-sembada beras. Kecepatan diseminasi sangat tergantung kepada aktivitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada. Pada pertengahan dasawarsa 1970-an hampir di semua wilayah DAS Citanduy pertambahan jumlahnya sangat cepat, karena pada masa itu PPL ditargetkan untuk membentuk 16 kelompoktani di dalam wilayah kerjanya, berkenaan adanya cara kerja baru penyuluhan, yaitu Latihan dan Kunjungan (*Trainig and Visit*).

Dalam hal kelompok UPSA dan Model Farm, kelembagaan yang terbentuk mula-mula pada umumnya adalah dalam rangka petak percontohan. Jumlahnya relatif sedikit dalam tiap wilayah DAS Citanduy. Diseminasinya sangat lambat karena secara khusus model konservasi secara keproyekan ini tidak mempunyai petugas lapangan yang cukup jumlah dan kopetensinya. Sampai sejauh ini proytek percontohan tersebut diintegrasikan dengan instansi pemerintah lainnya.

Diseminasi pembentukan KUBE dan berkembang menjadi KUD terjadi dengan penggantian nama Badan Usaha Unit Desa (BUUD) menjadi Koperasi Unit Desa (KUD), sesuai dengan kehendak Pemerintah Pusat (Inpres No. 2 Tahun 1978), meskipun demikian perubahan tersebut di DAS Citanduy tidak berjalan cepat karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh kelembagaan koperasi tersebut bersamaan dengan perubahan nama. Meskipun ada uluran tangan dari aparat pemerintah di daerah (dalam hal ini Kantor Departemen Koperasi Kabupaten) untuk membantu memenuhi persyaratan tersebut, tetapi kegiatan pengurus KUD yang bersangkutan lebih banyak berpengaruh kepada kecepatan perubahan.

6.2. Perubahan Fungsi Struktur

Kelembagaan produksi, seperti kelompoktani didirikan mula-mula sebagai "wadah belajar" anggota-anggotanya melalui penyuluhan yang dilaksanakan oleh PPL. Dimulai sekitar tahun 1975 fungsi tersebut diintensifkan pelaksanaannya, karena diperkenalkannya oleh Pemerintah Pusat cara kerja penyuluhan Latihan dan Kunjungan (La-Ku, *Training and Visit*). Dalam La-Ku PPL mengatur waktunya tiap dua minggu dua hari untuk istirahat, dua hari untuk mengikuti pelatihan dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dua hari untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi, dan delapan hari untuk mengunjungi kelompoktani-kelompoktani. Dalam kunjungan ini PPL diatur agar dapat mengunjungi kelompok yang berbeda, sehingga setiap PPL harus mempunyai enam belas kelompok binaan. Instruksi ini telah menyebabkan PPL memacu kegiatannya dalam membentuk kelompoktani baru dan berusaha berdisiplin mengunjungi kelompoktani dengan jadwal yang ketat. Cara kerja La-Ku mendiseminasi dari kelompok ke kelompok atas usaha PPL. Meskipun kenyataannya tidak mudah dilakukan karena banyak petani warga kelompok tidak dapat mengikuti jadwal yang ditetapkan, karena berbagai sebab.

Oleh karena itu cara kerja La-Ku hanya dapat dipraktekkan sekitar 3 tahun, untuk menjadi hilang berangsur-angsur.

Bagi kelompoktani perubahan fungsi yang kedua terjadi sesudah Pemerintah Pusat memperkenalkan cara perencanaan usahatani kepada mereka. Ketika itu ada Program Intensifikasi Khusus (Insus) untuk mendukung upaya swasembada beras. Kelompoktani yang ikut dalam Program Insus mendapatkan kredit Bimas - kemudian Kredit Usaha Tani (KUT) – dari Bank Rakyat Indonesia (BRi). Untuk itu dengan bimbingan PPL kelompoktani perlu membuat Rencana Kebutuhan Kelompok (RKK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang pada dasarnya adalah rumusan jumlah berbagai sarana usahatani yang dimintakan kreditnya oleh kelompok bagi anggota-anggotanya. Permintaan itu akan diikuti oleh kiriman sarana usahatani yang diterima oleh pengurus kelompok untuk dibagikan kepada anggota. Fungsi "wadah belajar" sudah bertambah dengan "pengadaan dan distribusi sarana usahatani".

Perubahan yang berarti terjadi pada kelembagaan konservasi, seperti kelompok UPSA dan Model Farm sebagai bias dari perubahan kelembagaan produksi seperti tersebut di atas. Perubahan tersebut terjadi karena secara operasional fungsi-fungsi kelembagaan konservasi tersebut diintegrasikan ke dalam peranan instansi pemerintah yang b ertanggung jawab dalam aspek produksi pertanian, meskipun dalam beberapa hal fungsi dan struktur kelembagaan konservasi juga mendapat intervensi dari instansi kehutanan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal.

Sedangkan kelembagaan koperasi, seperti KUBE dan KUD yang sudah di DAS Citanduy apa umumnya tidak terkena "intervensi" pemerintah yang menyebabkan dirinya berubah fungsi selama masa pemerintahan Orde Baru.

Perubahan yang berarti pada struktur internal kelembagaan koperasi, selama pemerintahan Orde Baru tidak terjadi. Pada masa pemerintahan Pasca Orde Baru perubahan-perubahan baru terjadi berkat peraturan perundangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang membuka peluang bagi perubahan. Beberapa perubahan berdampak positif seperti dibiarkannya tumbuh koperasi yang bukan KUD, didorong berdirinya kelembagaan keuangan mikro, dan lain-lain.

Dalam suasana reformasi dan kebebasan, kelembagaan produksi dan kelembagaan konservasi di tingkat komunitas lokal juga banyak yang mengembangkan fungsi asalnya untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan konservasi yang dapat dipergunakan bagi kesejahteraan anggota. Hal yang sama diupayakan oleh KUD.

Oleh karena itu tiga jenis kelembagaan di DAS Citanduy ternyata berfungsi sama dengan salah satu atau beberapa kelembagaan sudah hidup secara tradisional di DAS Citanduy sejak lama (sebelum 1945). Jumlah kelembagaan tradisional tersebut makin menyusut karena fungsi yang dijalankannya tidak sesuai lagi dengan kemajuan kehidupan.

Dalam pada itu kelembagaan-kelembagaan baru muncul. Konsep "lokalitas usahatani" telah dipergunakan untuk merumuskan konsep organisasi penyuluhan pertanian dan konsep pemasaran hasil usahatani, khususnya padi. Konsep organisasi penyuluhan pada tataran petani menurunkan konsep kelembagaan produksi dan konservasi, yaitu kelompoktani; sedang konsep pemasaran hasil usahatani menunjuk kepada kelembagaan koperasi, yang semula disebut sebagai Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan kemudian

diubah namanya menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Ketiga kelembagaan tersebut dirumuskan oleh Pemerintah Pusat pada tahun yang hampir bersamaan dalam wilayah DAS Citanduy.

Di tiga wilayah DAS Citanduy: hulu, tengah, dan hilir diseminasi kelembagaan dilaksanakan oleh aparat pemerintah, dalam hal ini Penyuluh Pertanian Lapangan untuk kelompoktani dan kelompok UPSA dan Model Farm, dan Petugas Kantor Departemen Koperasi (untuk KUD). Diseminasi kelembagaan kelompoktani dan konservasi berjalan lambat, kecuali ketika Penyuluh Pertanian Lapangan mendapat instruksi untuk membentuk 16 kelompoktani dalam wilayah kerjanya, untuk mengakomodasi konsep cara kerja baru dalam penyuluhan pertanian, yaitu cara kerja Latihan dan Kunjungan (La-Ku). Diseminasi KUD juga berjalan cepat, karena pada dasarnya adalah proses pengubahan nama dari BUUD menjadi KUD.

Sepanjang sejarah kelembagaan produksi dan konservasi, perkembangan fungsi dan struktur eksternal pernah terjadi. Keduanya atas prakarsa Pemerintah dan berlangsung dalam kaitannya dengan perintah "atasan" melalui penyuluh pertanian untuk dikerjakan bersama kelompoktani. Perubahan fungsi ini adalah perluasan fungsi kelompoktani sebagai "wadah belajar" dengan fungsi perencanaan kebutuhan sarana produksi dan pembagian sarana produksi kepada anggota-anggotanya. Sedang pembahan struktur eksternal terjadi juga atas prakarsa Pemerintah dan juga berlangsung melalui perintah kepada penyuluh pertanian untuk dikerjakan bersama kelompoktani produksi dan konservasi dalam hal kerjasama antar kelompoktani-kelompoktani dalam suatu gabungan kelompoktani.

Dengan "intervensi" Pemerintah, ketiga kelembagaan terkemuka itu – kelompoktani produksi, kelompoktani konservasi, dan KUD – sampai batas-batas tertentu menjalankan fungsinya masing-masing mendukung produksi pangan dan konservasi tanah dan air dalam perspektif pengelolaan DAS. Di antara mereka memperluas fungsi dan struktur eksternalnya tanpa mempengaruhi fungsi dan struktur kelembagaan lainnya. "Tidak ada indikasi tentang adanya jalur perkembangan yang alami – karena terjadinya di bawah intervensi Pemerintah – yang dibentuk oleh ketiga kelembagaan utama, baik secara sendiri maupun bersama-sama".

Keadaan berbeda ketika "intervensi" Pemerintah kendor sesudah pemerintahan Orde Baru, dan birokrasi penyuluhan pertanian terfragmentasi karena adanya desentralisasi. Fungsi kelompoktani sebagai perencana dan pembagi sarana produksi pertanian, bahkan sebagai "wadah belajar" ternyata tidak dapat berjalan. Sebagian dari mereka mencoba merintis usaha ekonomi dalam perdagangan pupuk, penangkaran bibit, dan sebagainya. Sebaliknya banyak KUD – sebagai kelembagaan ekonomi – yang bertahan bahkan mengembangkan usahanya ke luar dari sekedar perdagangan padi/beras dan pengadaan sarana produksi pertanian.

6.3. Dinamika Kelembagaan

Upaya memposisikan pengelolaan DAS Citanduy dalam perspektif kelembagaan, sebagai mesin penggerak peningkatan produksi dan konservasi, akan dapat berhasil apabila permasalahan kelembagaan yang sedang dihadapi di DAS sekarang ini dapat diatasi.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, telaah terhadap dinamika berbagai kelembagaan dominan yang terkait dengan pengembangan produksi dan konservasi menjadi penting dan strategis.

Dengan sasaran bagaimana gambaran dinamika perkembangan kelembagaan produksi, konservasi, dan koperasi dalam analisis ini dipaparkan telaah tiga studi kasus kelembagaan tersebut dari tiga wilayah DAS Citanduy di enam komunitas desa.

Telaah terhadap studi kasus kelembagaan produksi di tiga wilayah DAS Citanduy menggambarkan eratnya keterkaitan antara kelompok-kelompok produksi dengan pengalaman masyarakat di dalam komunitasnya (Tabel 8). Berdirinya kelompoktani-kelompoktani (produksi) secara historis erat kaitannya dengan pengalaman masyarakat sebelumnya dalam sektor pertanian dan kelembagaan tradisi-religi yang telah ada sebelumnya.

Pada periode 1978-2002 kelompoktani (produksi) berkembang secara linier ke arah kemajuan dan perbesaran skala (perubahan struktur) dengan peranan yang besar dari *leadership* dan anggota. Peranan pemerintah ada tetapi tidak dominan, sehingga kelompoktani (produksi) menjadi kelompok yang berkelanjutan. Berkembangnya metode-metode partisipatif, seperti Sekolah Lapang Pemberantasan Hama Terpadu (SLPHT), turut mempengaruhi perkembangan kelompoktani (produksi).

Selanjutnya, suatu sintesis terhadap beberapa studi kasus kelembagaan konservasi (Tabel 9) menunjukkan bahwa, secara historis berdirinya kelembagaan konservasi di DAS Citanduy terkait dengan kelembagaan-kelembagaan tradisi-religi dan sebagai respons pembangunan petak percontohan (UPSA) dan Model Farm yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (pusat) melalui Proyek Citanduy I dan Proyek Citanduy II. Dinamika perkembangan kelembagaankonservasi, dalam periode 1985-1998, lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat

Meskipun demikian, terdapat pula dinamika perkembangan kelembagaan konservasi yang ditentukan oleh keinginan dan kepentingan riil anggota kelembagaan tersebut. Kelembagaan konservasi tersebut semakin dinamis karena di dalam kelembagaan telah berkembang peranserta anggota, pendanaan yang digalang secara gotong-royong berupa iuran, dan dikembangkannya diversifikasi usaha selain kegiatan konservasi di dalam kelembagaan tersebut. Puncak kinerja kelembagaan konservasi dicapai lebih dominan disebabkan oleh keinginan dan inisiatif anggota kelembagaan tersebut. Dalam hal kelembagaan konservasi yang erat kaitannya dengan kearifan lokal.

Analisis dinamika kelembagaan berikutnya adalah pada kelembagaan koperasi. Sintesis terhadap hasil tiga studi kasus kelembagaan koperasi (Tabel 10) menunjukkan bahwa, meskipun pendirian kelembagaan koperasi berlandaskan pada inisiatif masyarakat lokal dan "mengakar" pada kelembagaan tradisi, tetapi dengan dominannya kebijakan dan penetrasi pemerintah terhadap kelembagaan ini menyebabkan kelembagaan koperasi tidak mampu untuk *sustain* dan *survive*.

Tabel 8. Matriks Studi Kasus terhadap Kelembagaan Produksi di Tiga Wilayah DAS Citanduy

Kasus	Wilayah	Fase Sampai Pendirian	Dinamika		
			Pertumbuhan	Puncak Kinerja	Masa Surut
1	Ilulu	Masyarakat petani telah mengenal kelompok tani bentukan pemerintah kolonial; 1970-1978 telah mengenal penyuluhan, pengorganisasian petani, dan petani andalan. Berdiri 1978 dengan gagasan Dinas Pertanian: kelompok dusun menjadi kelompok hamparan	1978-2002: ketua kelompok menjadi figur inti, tingkat adopsi tinggi, penyuluhan intensif, struktur kelompok berkembang, ketua menjadi pengusaha, partisipasi anggota menurun (1990-2002). Penyebab: program Bimas/Insus, kebijakan pemerintah dalam peningkatan produksi dan menjadi sentra beras, peningkatan pendapatan, ada sumber pandapatan lain dari kelapa sawit, penyuluhan menurun dan metode penyuluhan membosankan	1981-1986 : diindikasikan dengan partisipasi anggota tinggi karena dukungan kebijakan pemerintah dalam peningkatan produksi beras.	1995-2002: aktivitas kelompok stagnan, ketua "berjalan sendiri", dan penyuluhan menurun karena ada sumber pendapatan lain, dari penebangan kayu, nilai tukar padi menurun, kinerja Dinas Pertanian menurun, dan berkurangnya dana/program dari pemerintah pusat
		Masyarakat mengenal benih jenis baru, pupuk buatan, ada mantri pertanian, dan pengorganisasian desa (akhir 1960-an). Berdiri 1978 atas gagasan Dinas Pertanian tetapi intervensi minimal, kelompok dusun menjadi kelompok hamparan	1978-2002: jumlah dan partisipasi anggota meningkat, pemekaran kelompok, seksi dalam kelompok berkembang, komunikasi kelompok berkembang,dan pembahan pengurus karena program Bimas/ Insus, dan motif peningkatan produksi. Kemudian struktur tidak berfungsi karena peranan dari "atas" meningkat dan mobilisasi.	2001-2002: realisasi pengembalian kredit baik dan kelompok tetap survive karena peranan ketuanya *(leadership)*.	
2	Tengah	Berdiri tahun 1981 atas gagasan PPL (Dinas Pertanian) dan tokoh masyarakat, dari kelompok dusun menjadi kelompok hamparan.	1981-2002: tingkat adopsi teknik budidaya dan sistem irigasi tinggi, kelompok menetapkan SLPHT, sebagai penyalur pupuk, partisipasi tinggi, fungsi kelompok meningkat, dan ada ikatan bempa iuaran dalam kelompok karena kebijakan dari "atas"	1992-2002: diindikasikan dengan partisipasi anggota tinggi, program pendampingan intensif, dan bertambah-nya kegiatan/fungsi lembaga karena inisiati dari anggota kelompok dan kebijakan pemerintah.	
3	Ililir	Wadah Kelompoktani, berdiri tahun 1996 atas gagasan dari "bawah" sebagai pemekaran dari kelompoktani sebelumnya yang diprakarsai para tokohnya.	1998-2002: partisipasi anggota, komunikasi dengan PPL lancar, terjadi pengembangan struktur karena motif anggota meningkatkan pendapatan dan bantuan dana.	2002: menjadi kelompok tani terbaik karena figur ketua, partisipasi anggota, proses pembelajaran dari kelompok asal.	
		Berawal dari kelembagaan tradisional, sama usianya dengan kegiatan pertanian, berperan sebagai kelembagaan produksi, irigasi.	Partisipasi anggota tinggi, Tahun 1973-2001 kepengurusan disesuaikan dengan kelompoktani yang polanya sama dengan sentra beras lainnya, tingkat adopsi me-ningkat dengan penggunaan teknologi pertanian, berkembang kegiatan simpan pinjam dan industri rumah tangga karena kemampuan pengurus dan anggota, motif peningkatan kesejahteraan, dan peran pemerintah	1981-1987: mendapatkan penghargaan karena prestasi kelompok karena peran anggota dan pengurus kelompok	
Ikhtisar		Berdirinya kelembagaan produksi secara historis erat kaitannya dengan pengalaman masyarakat sebelumnya dalam sektor pertanian dan kelembagaan tradisi-religius yang telah ada sebelumnya. Pada periode 1978-2002 kelompoktani (produksi) berkembang secara linier ke arah kemajuan dan perbesaran skala (perubahan struktur) dengan peranan yang besar dari *leadership* dan anggota. Peranan pemerintah ada tetapi tidak dominan, sehingga kelompok tani (produksi) menjadi kelompok yang berkelanjutan. Berkembangnya metode-metode partisipatif, seperti SLPHT, turut mempengaruhi perkembangan kelompoktani (produksi). Puncak kinerja kelembagaan produksi ditunjukkan dengan peranserta anggota yang tinggi dan tingkat pengembanlian kredit yang tinggi.		

Tabel 9. Matriks Studi Kasus terhadap Kelembagaan Konservasi di Wilayah DAS Citanduy

Kasus	Wilayah	Fase Sampai Pendirian	Dinamika		
			Pertumbuhan	Puncak Kinerja	Masa Surut
1	Hulu	1978-85: Kelembagaan konservasi dibangun oleh pemerintah dan tokoh masyarakat, sebagai respons UPSA (Procit I) dan Model farm (Procit II).	1986-2002: jumlah anggota meningkat, anggota petani pemilik-penggarap dan penggarap dan anggota bisa dari luar desa, pendanaan dari iuran karena peranan dari "atas" Anggota petani pemilik-penggarap dan penggarap, iuran konservasi dipisahkan dari iuran anggota, perkembangan kelompok tidak signifikan karena ditentukan dari "atas" Kepengurusan disesuaikan dengan kelembagaan produksi karena masuknya program-program pemerintah	1996: diindikasikan dengan partisipasi dalam rapat dan gotong-royong yang tinggi karena kepentingan anggota Diindikasikan dengan kemampuan kelompok mengatasi kesulitan serangan hama dan perkembangan usaha simpan pinjam dan industri rumahtangga karena kemampuan anggota dan pengurus dan ada kebijakan pendanaan oleh pemerintah	1997: diindikasikan dengan partisipasi anggota menurun dan kerusakan UPSA dan Model Farm yang semakin tinggi
2	Tengah				
3	Hilir				
Ikhtisar		Secara historis berdirinya kelembagaan konservasi di DAS Citanduy terkait dengan kelembagaan-kelembagaan tradisi-religi dan sebagai respons terhadap program konservasi tanah dan air, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dinamika perkembangan kelembagaan konservasi, dalam periode 1973-2002, lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, terdapat pula dinamika perkembangan kebijakan pemerintah dalam konservasi tanah dan air dan juga ditentukan oleh keinginan dan kepentingan nil anggota kelembagaan tersebut. Kelembagaan konservasi tersebut semakin dinamis karena di dalam kelembagaan telah berkembang peranserta anggota, pendanaan yang digalang secara gotong-royong berupa iuran, dan dikembangkannya diversifikasi usaha di dalam kelembagaan tersebut. Puncak kinerja kelembagaan konservasi dicapai lebih dominan disebabkan oleh keinginan dan inisiatif anggota kelembagaan tersebut. Dalam hal kelembagaan konservasi yang erat kaitannya dengan kelembagaan tradisi-religi (kearifan lokal), peran pemerintah dengan program-programnya lebih bersifat sebagai "tempelan" saja tanpa memberikan suatu inovasi baru bagi pengembangan kelembagaan			

Tabel 10. Matriks Studi Kasus terhadap Kelembagaan Koperasi di Wilayah DAS Citanduy

Kasus	Wilayah	Fase Sampai Pendirian	Dinamika		
			Pertumbuhan	Puncak Kinerja	Masa Surut
1	Hulu	Mengakar pada perkumpulan petani padi dan didirikan oleh perkumpulan tersebut, didukung kepala desa, dan tokoh desa karena kebijakan pemerintah	1973-2002: berbadan hukum; anggota 57 persen dari populasi; struktur tanpa BP karena anjuran Kandepkop; ketua berperan sentral	1999: penyaluran pupuk dengan sistem kartu lancar dan berdasarkan RDKK karena KUT	Setelah 1999 : subsidi pupuk dicabut, tidak mampu bersaing bebas, dan Bulog tidak membeli padi dari KUD karena kebijakan pemerintah
		Mengakar pada kelembagaan kerja-sama didukung tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pergerakan koperasi	1973-2002: menjadi KUD berbadan hukum sejak 1982, peningkatan jumlah anggota, perubahan struktur dan kepengurusan karena keinginan pemerintah menjadi KUD Mandiri	1990: menjadi KUD Mandiri 2002: KUD memiliki beberapa unit usaha, pengurus, manajer & karyawan lengkap	
2	Tengah	Tidak mengakar pada kelembagaan tradisi & berdiri diprakarsai oleh tokoh masyarakat dan pemda	1982-1998: berbadan hukum, standar KUD, perluasan struktur organisasi karena program swasembada pangan & beras nasional, kegiatan usaha semakin berkembang	1984-1998: berdiri unit usaha wa-serda, transport, RMU, penyaluran minyak tanah, dan pabrikasi urea tablet karena memanfaatkan peluang pasar dan pinjaman dari Bank	Setelah Tahun 1998 menyurut
3	Hilir	Kebijakan pemerintah dengan BUUD 1972-1976, berdiri BUUD tahun 1978	1978-2001: berbadan hukum, jumlah anggota semakin meningkat, petani menjadi anggota baru mendapat pelayanan, berubah menjadi KUD, penggantian pengurus karena kebijakan pemerintah	1990-1997: pengadaan pangan dan saprodi berkembang, karena didukung oleh kebijakan pemerintah	1998: pengadaan pangan dan saprodi menurun drastis, kredit macet, karena dicabutnya kebijakan pemerintah tentang KUD
		Mengakar pada "Perkumpulan Simpan-Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi atas inisiatif anggota	1985-2001: berubah menjadi KUD, berbadan hukum, anggota meningkat, modal dari dalam lebih besar dari modal dari luar, pergantian pengurus, organisasi semakin kompleks karena perkembangan unit usaha.	membangun kantor, membuka unit usaha baru, perkembangan modal & SHU tertinggi	19989: dicabutnya kebijakan pemerintah tentang KUD
Ikhtisar		Meskipun pendirian kelembagaan koperasi berlandaskan pada inisiatif masyarakat lokal dan "mengakar" pada kelembagaan tradisi, tetapi dengan dominannya kebijakan dan penetrasi pemerintah terhadap kelembagaan ini menyebabkan kelembagaan koperasi tidak mampu untuk *sustain* dan *survive*. Kelembagaan koperasi "berkembang" dalam periode 1990-1997. Perkembangan tersebut diindikasikan dengan perkembangan jumlah unit pelayanan dan perubahan struktur dan organisasi koperasi. Perkembangan ini karena didukung oleh kebijakan pemerintah temtama erat kaitannya dengan sektor pertanian tanaman pangan, kemudian mengalami masa sumt ketika terjadi krisis dan ketika pemerintah mencabut kebijakan-kebijakannya yang mendukung aktivitas kelembagaan ini. Dari studi kasus ini tampak bahwa kelembagaan koperasi yang dibangun oleh inisiatif lokal dan mengakar pada kelembagaan tradisi, masif relatif lebih baik kinerjanya dibandingkan yang lain ketika mengahadapi faktor-faktor eksternal, seperd kebijakan pemerintah dan krisis ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan peranan pemerintah yang dominan menyebabkan kelembagaan ini tidak mandiri dan tidak berkelanjutan.		

Kelembagaan koperasi "berkembang" dalam periode 1990-1997. Perkembangan tersebut diindikasikan dengan perkembangan jumlah unit pelayanan dan perubahan struktur dan organisasi koperasi. Perkembangan ini karena didukung oleh kebijakan pemerintah terutama erat kaitannya dengan sektor pertanian tanaman pangan, kemudian mengalami masa surut ketika terjadi krisis dan ketika pemerintah mencabut kebijakan-kebijakannya yang mendukung aktivitas kelembagaan ini. Dari studi kasus ini tampak bahwa kelembagaan koperasi yang dibangun oleh inisiatif lokal dan mengakar pada kelembagaan tradisi, masih relatif lebih baik kinerjanya dibandingkan yang lain ketika mengahadapi faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah dan krisis ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan peranan pemerintah yang dominan menyebabkan kelembagaan ini tidak mandiri dan tidak berkelanjutan.

6.4. Analisis *Social Capital* terhadap Dinamika Kelembagaan Komunitas Lokal

Dinamika komunitas lokal digambarkan dengan berlandaskan pada sistesis tiga jenis kelembagaan komunitas lokal di enam komunitas desa di tiga wilayah DAS Citanduy (Tabel 11). Munculnya kelembagaan komunitas lokal di DAS Citanduy yang mengakar pada kelembagaan tradisi-religi di tingkat komunitas memperkuat kemampuan kelembagaan tersebut untuk *sustain* dan *survive*. Dinamika perkembangan kelembagaan tersebut dipengaruhi oleh inisiatif lokal, semangat tolong-menolong, dan kebijakan pemerintah. Akan tetapi kebijakan pemerintah masih relatif menonjol. Kebijakan pemerintah yang menonjol, terutama penyediaan kapital, dimanfaatkan oleh kelembagaan komunitas lokal untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan seperti dengan diversifikasi usaha.

Puncak kinerja kelembagaan komunitas lokal ditunjukkan dengan peranserta anggota yang meningkat, diversifikasi usaha, dan ekspansi ke sektor non-pertanian. Masa surut kelembagaan tersebut terjadi ketika pemerintah mencabut kebijakannya terhadap kelembagaan komunitas lokal, ketidakmampuan manajemen, dan diversifikasi usaha tidak berkembang.

Fakta-fakta tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka konseptual Modal Sosial. Modal sosial diartikan sebagai suatu sistem yang mengacu kepada atau hasil dari organisasi sosial-ekonomi, seperti pandangan umum, kepercayaan, resiprositas, pertukaran ekonomi dan informasi, kelompok-kelompok formal dan informal, serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi modal fisik dan modal manusia sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif dan pembanguman (Colletta and Culien, 2000).

Modal sosial memiliki empat dimensi: (1) integrasi, berupa ikatan-ikatan antar kekerabatan, agama, dan etnik; (2) pertalian, yaitu ikatan dengan komunitas lain di luar komunitas asal; (3) integritas organisasional, yaitu kemampuan dan keefektifan institusi negara menjalankan fungsinya; dan (4) sinergi, yaitu relasi antara pemimpin dan institusi pemerintahan dengan komunitas. Fokus perhatiannya, apakah negara memberikan ruang yang luas atau tidak bagi partisipasi warganya. Dimensi pertama dan kedua berada pada tingkat horizontal, sedangkan dimensi ketiga dan keempat, ditambah dengan pasar *(market)* berada pada tingkat vertikal.

Tabel 11. Matriks Pola Perkembangan Tiga Jenis Kelembagaan di DAS Citanduy

Kasus	Nama Kelembagaan	Fase Sampai Pendirian	Dinamika		
			Pertumbuhan	Puncak Kinerja	Masa Surut
1	Produksi	Berdirinya kelompoktani-kelompoktani (produksi) secara erat kaitannya dengan pengalaman masyarakat sebelumnya dalam pembangunan pertanian dan kelembagaan tradisi-religi yang telah ada sebelumnya.	Pada periode 1978-2002 kelompoktani (produksi) berkembang secara linier, kemajuan dan perbesaran skala (perubahan struktur) dengan peranan yang besar dari pemimpin dan anggota.	Ditunjukkan dengan peranserta anggota yang tinggi dan tingkat pengembalian kredit yang tinggi.	Ketika nilai tukar padi menurun
2	Konservasi	Secara historis berdirinya kelembagaan konservasi di DAS Citanduy terkait dengan kelembagaan-kelembagaan tradisi-religius dan sebagai respons program konservasi tanah dan air yang dilakukan oleh pemerintah	Dinamika perkembangan kelembagaan konservasi, dalam periode 1973-2002, lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dan kepentingan riil anggota kelembagaan tersebut Semakin dinamis karena di dalam kelembagaan telah berkembang peranserta anggota, pendanaan yang digalang secara gotong-royong berupa iuran, dan dikembangkannya diversifikasi usaha.	Puncak kinerja kelembagaan konservasi dicapai lebih dominan disebabkan oleh keinginan dan inisiatif anggota kelembagaan tersebut Dalam hal kelembagaan konservasi yang erat kaitannya dengan kelembagaan tradisi-religi, seperti subak, peran pemerintah dengan program-programnya lebih bersifat sebagai "tempelan" saja tanpa memberikan suatu inovasi baru bagi pengembangan kelembagaan.	Ketika partisipasi anggota menurun dan kegagalan komunikasi
3	Koperasi	Kelembagaan koperasi berlandaskan pada inisiatif masyarakat lokal dan "mengakar" pada kelembagaan tradisi	Kelembagaan koperasi "berkembang" dalam periode 1990-1997. Perkembangan tersebut diindikasikan dengan perkembangan jumlah unit pelayanan dan perubahan struktur dan organisasi koperasi. Perkembangan ini karena didukung oleh kebijakan pemerintah terutama erat kaitannya dengan sektor pertanian tanaman pangan.	Ketika terjadi perkembangan diversifikasi usaha dan peranserta anggota yang tinggi	Ketika terjadi krisis dan ketika pemerintah mencabut kebijakan-kebijakannya yang mendukung aktivitas kelembagaan ini.
Ikhtisar		Munculnya kelembagaan produksi, konservasi, dan koperasi yang mengakar pada kelembagaan tradisi-religi di tingkat komunitas memperkuat kemampuan kelembagaan tersebut untuk *sustain* dan *survive*. Dinamika perkembangan kelembagaan tersebut dipengaruhi oleh inisiatif lokal, semangat tolong-menolong, dan kebijakan pemerintah. Akan tetapi kebijakan pemerintah masih relatif menonjol. Kebijakan pemerintah yang menonjol, terutama penyediaan kapital, dimanfaatkan oleh kelembagaan tersebut untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan seperti dengan diversifikasi usaha. Puncak kinerja kelembagaan tersebut ditunjukkan dengan peranserta anggota yang meningkat, diversifikasi usaha, dan ekspansi ke sektor non-pertanian. Masa surut kelembagaan produksi, konservasi, dan koperasi terjadi ketika pemerintah mencabut kebijakannya terhadap kelembagaan tersebut, ketidakmampuan manajemen, dan diversifikasi usaha ddak berkembang.		

BAB VII

KESIMPULAN

Wilayah hilir DAS Citanduy adalah wilayah yang memiliki tingkat keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal yang tertinggi. Kelembagaan konservasi merupakan kelembagaan dengan tingkat kerberlanjutan tertinggi di wilayah hulu dan tengah DAS Citanduy. Sedangkan kelembagaan koperasi merupakan kelembagaan dengan tingkat keberlanjutan tertinggi di wilayah hilir DAS Citanduy. Sedangkan berdasarkan tipe-tipe kelembagaan komunitas lokal, maka dapat dirumuskan bahwa kelembagaan konservasi merupakan kelembagaan komunitas lokal yang memiliki tingkat keberlanjutan yang tertinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal, yaitu: (1) jejaring kerjasama; (2) intervensi positif pemerintah; (3) kecukupan anggaran; dan (4) aturan-aturan tertulis. Dengan demikian, melalui program-program pengembangan jejaring kerjasama, intervensi pemerintah, kecukupan pangan, dan aturan-aturan tertulis dapat meningkatkan keberlanjutan kelembagaan *grassroots* di DAS Citanduy.

Tipologi kelembagaan komunitas lokal "dikonstruksi" berdasarkan dua variabel pokok, yaitu: (1) Tinggi-rendahnya "keseimbangan pelayanan-peranserta" dalam suatu kelembagaan; dan (2) Berfungsi-tidaknya *good governance* dalam suatu kelembagaan. Berdasarkan kedua variable pokok tersebut dari tipologi kelembagaan diidentifikasi empat tipe kelembagaan, yakni: (1) Tipe-1, kelembagaan yang sustain; (2) Tipe-2, kelembagaan semi-sustain dengan kendala manajemen; (3) Tipe-3, kelembagaan yang tidak-sustain; dan (4) Tipe-4, kelembagaan semi-sustain dengan kendala *good governance.*

Kelembagaan-kelembagaan komunitas lokal di wilayah hulu adalah wilayah yang memiliki persentase tertinggi (23.7 persen) kelembagaan yang berkelanjutan. Kelembagaan yang tidak berkelanjutan terbanyak (45.8 persen) juga terdapat di wilayah hulu DAS Citanduy. Kelembagaan komunitas lokal yang dikategorikan sebagai kelembagaan semi sustain dengan kendala manajemen terbanyak terdapat di wilayah hilir (44.4 persen). Sedangkan kelembagaan yang dikategorikan sebagai kelembagaan semi sustain dengan kendala *good governance* terbanyak terdapat di wilayah tengah (17.9 persen).

Kelembagaan konservasi (24.5 persen) adalah kelembagaan yang sustain dibandingkan dengan kelembagaan produksi (16.3 persen) dan kelembagaan koperasi (20.0 persen). Sebanyak 40.8 persen responden menilai bahwa kelembagaan konservasi adalah kelembagaan yang tidak sustain dan penilaian ini relatif tinggi dibandingkan penilaian responden terhadap kelembagaan produksi dan koperasi. Kelembagaan yang dikategorikan sebagai kelembagaan yang semi sustain dengan kendala manajemen terbanyak dinilai oleh responden (37.8 persen) pada kelembagaan koperasi. Tipe yang keempat, yakni kelembagaan yang semi sustain dengan kendala *good governance,* terbanyak dinilai oleh responden (12.3 persen) pada kelembagaan produksi.

Puncak kinerja kelembagaan komunitas lokal ditunjukkan dengan peranserta anggota yang meningkat, diversifikasi usaha, dan ekspansi ke sektor non-pertanian. Masa surut kelembagaan tersebut terjadi ketika pemerintah mencabut kebijakannya terhadap

kelembagaan komunitas lokal, ketidakmampuan manajemen, dan diversifikasi usaha tidak berkembang.

Rendahnya tingkat *sustainability* dan *survivability* kelembagaan komunitas lokal karena belum berhasil dikembangkannya jejaring *(networking)* antar kelembagaan tersebut, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, kelembagaan komunitas lokal yang ada belum mampu mambangun dan mengembangkan jejaring dengan berbagai kelembagaan lain di luar komunitasnya. Akan tetapi kecenderungan ke arah itu sudah tampak, yakni dengan upaya diversifikasi usaha yang dilakukan oleh kelembagaan tersebut. Sedangkan secara vertikal, pemerintah dengan kebijakannya masih belum memberikan ruang yang luas bagi partisipasi anggota kelembagaan komunitas lokal untuk mengembangkan kreatifitasnya dan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merupakan *institutional incentive* dan menjadi fasilitator untuk membangun hubungan antar-kelembagaan (dalam hal ini kelembagaan komunitas lokal di DAS Citanduy) atau jejaring antar-kelembagaan yang berbasis pada kelembagaan-kelembagaan di tingkat komunitas. Secara empiris, studi ini membuktikan bahwa kelembagaan-kelembagaan komunitas lokal yang mengakar pada kelembagaan tradisi-religi dan komunitasnya lebih mampu bertahan dan *survive* dalam menghadapi pengaruh faktor-faktor ekstemal, termasuk persaingan global.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. 2004. Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pamong Sumberdaya Alam: Kasus Common Pool Resources (CPR) Daerah Aliran Sungai Citanduy. Bogor: Pusat Studi Pembangunan IPB.

Brinkerhoff, Derick W. and Arthur A. Goldsmith. 1992. *"Promoting the Sustainability of Development Institutions: A Framework for Strategy."* World Development, Vol. 20(3): Pp 369-383.

Colletta, Nat J. and Michelle L. Culien. 2000. *Violent Conflict and the Transformation of Sosial Capital Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala, and Somalia.* Washington, D.C. : The World Bank.

Dasgupta, Partha. 2000. *Economic Progress and the Idea of Social Capital* in *Social Capital A Multifaceted Perspective by Partha Dasgupta and Ismail Serageldin.* Washington, D.C. : The World Bank

Esman, Milton J. 1962. *The Elements of Institution Building.* Ithaca: Cornell University.

Fukuyama, Francis. 2001. *Trust The Social Virtues & The Creation of Prosperity.* New York: The Free Press.

Krueger, Richard A. 1988. *Focus Groups: A Practical Guide for Research.* New Delhi: SAGE Publications.

Morgan, David L. 1988. *Focus Groups As Qualitative Research.* London: SAGE Publications.

Patton, Michael Quirm. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods.* London: SAGE Publication

Prasetyo, Lilik Budi. 2004. Perubahan Biofisik dan Penggunaaan Lahan DAS Citanduy Tahun 1991-2003 dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pemerintahan Sumberdaya Alam (*Decentralized Natural Resources Management and Governance System)* Daerah Aliran Sungai Citanduy. *Project Working Paper Series No.01.* Bogor: Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor Bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia-UNDP.*

Schmidt, A. 1987. *Property, Power, and an Inquiry Into Law and Economic.* New York: Praeger

Uphoff, Norman. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases.* West Hartford Coonecticut: Kumarian Press.

Woolcock, Michael and Deepa Narayan. 1999. *Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy.* New York: The World Bank.

BIODATA PENULIS

Ir. Fredian Tonny, MS, lahir di Ketapang Kalimantan Barat Tanggal 14 Februari 1958. Menyelesaikan pendidikan S-1 tahun 1982 pada Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 1987 menyelesaikan S2 Sosiologi Pedesaan di Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 1996, penulis mendapatkan kesempatan untuk mengambil gelar PhD di bidang Sosiologi Pedesaan di Universitas Pertanian Malaysia (UPM).

Penulis mulai aktif di PSP-IPB setelah lulus sarjana dengan menjadi asisten peneliti dan kemudian menjadi dosen di Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB pada Tahun 1985. Saat ini penulis sebagai Kepala Bagian Ilmu-ilmu Sosial, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, IPB.

Selain mengajar, kegiatan lainnya yang juga ditekuni penulis adalah melakukan kegiatan penelitian, baik yang bekerjasama dengan IPB, swasta maupun lembaga penelitian lain. Penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan Daerah Aliras Sungai (DAS) diantaranya adalah "Studi untuk Penyusunan Pengelolaan DAS Batanghari Provinsi Jambi secara Terpadu" tahun 1992-1993, "Studi Penyusunan Pengelolaan DAS Solo secara Terpadu" tahun 1991-1992, dan "Penelitian Partisipasi Petani dan Dinamika Kelompok Tani dalam Program Konservasi Tanah dan Air di DAS Citanduy" tahun 1986. Sejak Tahun 1982 sudah banyak tulisan ilmiah yang dihasilkan penuhs, beberapa diantaranya yang berkaitan dengan DAS adalah "Partisipasi Petani dan Dinamika Kelompok Tani dalam Program Konservasi Tanah dan Air di DAS Citanduy : Kasus Pengorganisasian Petani di Kabupaten Ciamis, Cilacap, dan Tasikmalaya" (1987), "Analisis Kritis Pengembangan PIR Ketela Pohon di DAS Citanduy : Kasus Desa Sadaburni Kecamatan Majenang Cilacap" (1987), "Aspek Kelembagaan dan Partisipasi dalam Pengelolaan DAS Terpadu" (*Jurnal Sosial Ekonomi Mimbar SOSEK*, No. 8: 12-44, 1994).